

RKT

PUSJAK KGTK

2023

RENCANA KERJA TAHUNAN PUSJAK KGTK TAHUN 2023

KATA PENGANTAR

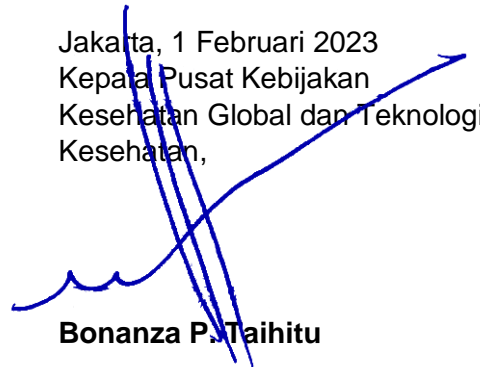


Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, berkat limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga penyusunan dokumen Rencana Kerja Tahunan (RKT) Pusat Kebijakan Kesehatan Global dan Teknologi Kesehatan (Pusjak KGTK) Tahun 2023 dapat tersusun. Rencana Kerja Tahunan (RKT) adalah dokumen perencanaan kinerja untuk periode 1 (satu) tahun berjalan yang memuat kebijakan program dan kegiatan. Dokumen ini merupakan penjabaran dari Rencana Aksi Kegiatan (RAK) tahun 2020 – 2024.

Dokumen RKT Pusjak KGTK tahun 2023 terdiri dari 2 (dua) kegiatan, yaitu 1) Perumusan Kebijakan Kesehatan Global dan Teknologi Kesehatan dan 2) Dukungan Manajemen Pelaksanaan Program di Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan.

Seluruh jajaran di lingkungan Pusjak KGTK baik Pejabat Struktural maupun Pejabat Fungsional diharapkan dapat berkontribusi dalam pencapaian target kinerja tahun 2023 secara optimal. Terima kasih kami sampaikan kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan laporan ini. Semoga RKT Pusjak KGTK tahun 2023 ini dapat memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan, baik sebagai informasi, evaluasi kinerja, maupun sebagai pendorong dalam meningkatkan kinerja Pusat Kebijakan Kesehatan Global dan Teknologi Kesehatan di masa yang akan datang.

Jakarta, 1 Februari 2023
Kepala Pusat Kebijakan
Kesehatan Global dan Teknologi
Kesehatan,



Bonanza P. Taihitu

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	1
DAFTAR ISI.....	2
BAB I PENDAHULUAN.....	2
1.1. Latar Belakang.....	3
1.2. Tujuan.....	3
1.3. Manfaat.....	4
1.4. Ruang Lingkup.....	4
1.5. Sasaran	4
1.6. Landasan Penyusunan	4
BAB II VISI, MISI, TUGAS DAN FUNGSI.....	5
2.1. Visi dan Misi.....	5
2.2. Tugas dan Fungsi.....	6
BAB III RENCANA KERJA TAHUN 2023	9
3.1. Sasaran Strategis	9
3.2. Indikator Kinerja Program (IKP) dan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	11
3.3. Capaian Indikator Kinerja Kegiatan Pusjak KGTK Tahun 2022	13
3.4. Perjanjian Kinerja.....	14
3.5. Rencana Kerja (Renja K/L) Pusat Kebijakan Kesehatan Global dan Teknologi Kesehatan Tahun 2023.....	16
BAB IV MONITORING DAN EVALUASI	17
4.1. Monitoring.....	17
4.2. Evaluasi.....	17
LAMPIRAN.....	20

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Kerja Tahunan (RKT) merupakan dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis yang telah dijabarkan dalam Rencana Aksi Kegiatan (RAK) untuk tingkat Eselon II sehingga bersifat menjembatani perencanaan jangka menengah dan jangka pendek (1 tahun). Penyusunan RKT ini dilakukan seiring dengan agenda penyusunan dan kebijakan anggaran, serta merupakan komitmen bagi unit kerja untuk mencapai target kinerja selama tahun berjalan. Kementerian/Lembaga (K/L) diwajibkan Menyusun Rencana Kerja K/L yang mengacu pada dokumen rencana strategis masing-masing K/L sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Rencana Kerja Tahunan (RKT) merupakan dokumen perencanaan dan penganggaran tahunan yang merupakan turunan dari dokumen perencanaan dan penganggaran 5 (lima) tahunan yaitu Rencana Strategis Kementerian Kesehatan pada tingkat Kementerian/Lembaga; Rencana Aksi Program (RAP) pada tingkat Unit Utama Eselon I; dan Rencana Aksi Kegiatan (RAK) pada tingkat Unit Kerja Eselon II.

Rencana Kerja Tahunan (RKT) Pusat Kebijakan Kesehatan Global dan Teknologi Kesehatan (Pusjak KGTK) tahun 2023 merupakan penjabaran lebih lanjut dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Rencana Aksi Kegiatan (RAK) Pusjak KGTK tahun 2022 – 2024. Dalam penyusunan RKT ditetapkan target kinerja untuk setiap indikator kinerja pada tingkat sasaran dan kegiatan yang harus dicapai selama satu periode anggaran. Dokumen RKT memuat penerapan Redesain Sistem Perencanaan dan Penganggaran (RSPP) dengan pendekatan perencanaan penganggaran berbasis kinerja, langkah-langkah atau tahapan tersebut dijabarkan dalam bentuk Klasifikasi Rincian Output (KRO), Rincian Output (RO), sampai dengan tahapan pelaksanaan atau pencapaian suatu output. Selain itu, dokumen RKT juga menjadi tolak ukur pencapaian akuntabilitas kinerja instansi melalui proses monitoring dan evaluasi terhadap target kinerja kegiatan (IKK).

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan menjelaskan bahwa Pusat Kebijakan Kesehatan Global dan Teknologi Kesehatan (Pusjak KGTK) sebagai salah satu Unit Kerja Eselon II di bawah naungan BKPK, memiliki tugas melaksanakan analisis, perumusan rekomendasi, dan evaluasi kebijakan di bidang kesehatan global dan teknologi kesehatan.

1.2. Tujuan

Tujuan penyusunan Rencana Kerja Tahunan (RKT) ini, antara lain:

1. Sebagai acuan penyusunan perencanaan dan penganggaran unit kerja yang lebih rinci (Rencana Kerja Anggaran-Kementerian/Lembaga/RKA-KL);
2. Memberikan gambaran pelaksanaan kegiatan Perumusan Kebijakan Kesehatan Global dan Teknologi Kesehatan tahun 2023;

3. Memberikan gambaran pelaksanaan kegiatan Dukungan Manajemen Pusat Kebijakan Kesehatan Global dan Teknologi Kesehatan, dan
4. Dokumen pengendalian serta pengawasan pencapaian sasaran dan target Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) tahun 2023 dalam pelaksanaan monitoring dan evaluasi.

1.3. Manfaat

Rencana Kerja Tahunan merupakan turunan dari Rencana Aksi Kegiatan Pusjak KGTK dalam kurun waktu 1 tahun berjalan, yaitu tahun 2023. Dengan adanya dokumen RKT ini diharapkan terjadi keselarasan perencanaan kegiatan mulai dari rencana kerja jangka menengah atau 5 (lima) tahunan (RPJMN, Renstra, RAP, dan RAK 2020-2024), sampai dengan rencana kerja tahunan (Renja K/L, RKT, dan RKA-K/L). Dengan demikian, target kinerja tahunan dan jangka menengah dapat dicapai dengan baik.

1.4. Ruang Lingkup

Ruang lingkup RKT ini adalah penjabaran kegiatan Pusjak KGTK berdasarkan Perubahan Renstra Kementerian Kesehatan dan Rencana Aksi Kegiatan Pusjak KGTK tahun 2020–2024.

1.5. Sasaran

Sasaran Dokumen RKT ini, meliputi:

1. Internal: meliputi seluruh Aparatur Sipil Negara baik PNS maupun Non PNS di lingkungan Pusjak KGTK yang terdiri dari yaitu pejabat struktural, pejabat fungsional, pejabat pelaksana, pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK), dan lainnya.
2. Eksternal:
 - a. Lintas Program dan Lintas Sektor di Kementerian Kesehatan.
 - b. Lintas Program dan Lintas Sektor di luar Kementerian Kesehatan terkait pelaksanaan akuntabilitas.

1.6. Landasan Penyusunan

Dasar hukum penyusunan RKT Pusjak KGTK, antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Rencana Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
6. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan;
7. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Kesehatan Tahun 2020-2024; dan
8. Rencana Aksi Kegiatan Pusat Kebijakan Kesehatan Global dan Teknologi Kesehatan Revisi Tahun 2020-2024.

BAB II

VISI, MISI, TUGAS DAN FUNGSI

2.1. Visi dan Misi

Pembangunan kesehatan, seperti yang dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2005–2025, merupakan upaya yang dilaksanakan oleh semua komponen bangsa Indonesia yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya sebagai investasi bagi pembangunan sumber daya manusia yang produktif secara sosial dan ekonomi. Dalam rangka mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur sesuai dengan RPJPN 2005–2025, Presiden RI menetapkan visi sebagaimana tertuang di dalam RPJMN 2020–2024 yaitu “Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian, Berlandaskan Gotong Royong”. Kementerian Kesehatan melaksanakan visi Presiden tersebut di bidang kesehatan yaitu dengan “Menciptakan Manusia yang Sehat, Produktif, Mandiri, dan Berkeadilan”.

Sebagai upaya dalam mewujudkan visi tersebut, maka ditetapkanlah 9 (sembilan) misi Presiden RI tahun 2020–2024, antara lain:

- 1) Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia;
- 2) Penguatan Struktur Ekonomi yang Produktif, Mandiri, dan Berdaya Saing;
- 3) Pembangunan yang Merata dan Berkeadilan;
- 4) Mencapai Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan;
- 5) Kemajuan Budaya yang Mencerminkan Kepribadian Bangsa;
- 6) Penegakan Sistem Hukum yang Bebas Korupsi, Bermartabat, dan Terpercaya;
- 7) Perlindungan bagi Segenap Bangsa dan Memberikan Rasa Aman pada Seluruh Warga;
- 8) Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Terpercaya; dan
- 9) Sinergi Pemerintah Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan.

Kementerian Kesehatan menjabarkan misi Presiden tersebut guna mendukung peningkatan kualitas manusia Indonesia, termasuk penguatan struktur ekonomi yang produktif, mandiri dan berdaya saing khususnya di bidang farmasi dan alat kesehatan, sebagai berikut:

- 1) Meningkatkan Kesehatan Reproduksi, Ibu, Anak, dan Remaja;
- 2) Perbaikan Gizi Masyarakat;
- 3) Meningkatkan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit;
- 4) Pembudayaan GERMAS; dan
- 5) Memperkuat Sistem Kesehatan.

Tujuan Kementerian Kesehatan yang akan dicapai dalam rangka mewujudkan visi dan melaksanakan misi selama periode 2020–2024, antara lain:

- 1) Terwujudnya Pelayanan Kesehatan Primer yang Komprehensif dan Berkualitas, serta Penguatan Pemberdayaan Masyarakat;
- 2) Tersedianya Pelayanan Kesehatan Rujukan yang Berkualitas;
- 3) Terciptanya Sistem Ketahanan Kesehatan yang Tangguh;

- 4) Terciptanya Sistem Pembiayaan Kesehatan yang efektif, Efisien, dan Berkeadilan;
- 5) Terpenuhinya SDM Kesehatan yang Kompeten dan Berkeadilan; dan
- 6) Terbangunnya Tata Kelola, Inovasi, dan Teknologi Kesehatan yang Berkualitas dan Efektif.

2.2. Tugas dan Fungsi

Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan (BKPK) sebagai salah satu Unit Eselon I di bawah Kementerian Kesehatan juga turut berperan dalam mencapai tujuan Kementerian Kesehatan tersebut sebagai upaya dalam mewujudkan visi dan misi Presiden RI. Sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan No. 5 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan, BKPK mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pemberian rekomendasi kebijakan pembangunan kesehatan. Fungsi yang diselenggarakan oleh BKPK dalam melaksanakan tugasnya, antara lain:

- 1) Penyusunan kebijakan teknis penguatan kebijakan pembangunan kesehatan;
- 2) Pelaksanaan analisis dan pemberian rekomendasi kebijakan pembangunan kesehatan;
- 3) Pelaksanaan integrasi dan sinergi pencapaian sasaran pembangunan kesehatan;
- 4) Evaluasi dan pelaporan pelaksanaan penguatan kebijakan pembangunan kesehatan;
- 5) Pelaksanaan administrasi Badan; dan
- 6) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

Pusat Kebijakan Kesehatan Global dan Teknologi Kesehatan (Pusjak KGTK) sebagai salah satu Unit Kerja Eselon II di bawah naungan BKPK, sesuai dengan Permenkes No. 5 Tahun 2022, memiliki tugas melaksanakan analisis, perumusan rekomendasi, dan evaluasi kebijakan di bidang kesehatan global dan teknologi kesehatan. Fungsi yang diselenggarakan oleh Pusjak KGTK dalam melaksanakan tugas tersebut, antara lain:

- 1) Penyusunan kebijakan teknis penguatan kebijakan di bidang kesehatan global dan teknologi kesehatan;
- 2) Pelaksanaan analisis dan perumusan rekomendasi kebijakan di bidang kesehatan global dan teknologi kesehatan;
- 3) Pelaksanaan diseminasi dan advokasi rekomendasi kebijakan di bidang kesehatan global dan teknologi kesehatan;
- 4) Pelaksanaan integrasi dan sinergi kebijakan di bidang kesehatan global dan teknologi kesehatan;
- 5) Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan; dan
- 6) Pelaksanaan urusan administrasi pusat.

Pada Bagian Ketujuh Peraturan Menteri Kesehatan No. 5 Tahun 2022 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan, telah diatur susunan organisasi di Pusjak KGTK, terdiri atas:

- 1) Subbagian Administrasi Umum; dan
- 2) Kelompok Jabatan Fungsional.

Subbagian Administrasi Umum mempunyai tugas melakukan penyiapan dan koordinasi penyusunan rencana, program, anggaran, pelaksanaan anggaran,

pembukuan dan inventarisasi barang milik negara, urusan sumber daya manusia, pengelolaan data dan sistem informasi, pemantauan, evaluasi, laporan, kearsipan, persuratan, dan kerumahtanggaan Pusat.

Selain tugas pokok dan fungsi utama yang telah disebutkan sebelumnya, Pusjak KGTK juga memiliki tugas tambahan berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor HK.01.07/Menkes/1332/2022 tentang Uraian Tugas dan Fungsi Organisasi Kementerian Kesehatan dan Pembentukan Tim Kerja dalam Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Organisasi. Tugas tersebut, antara lain:

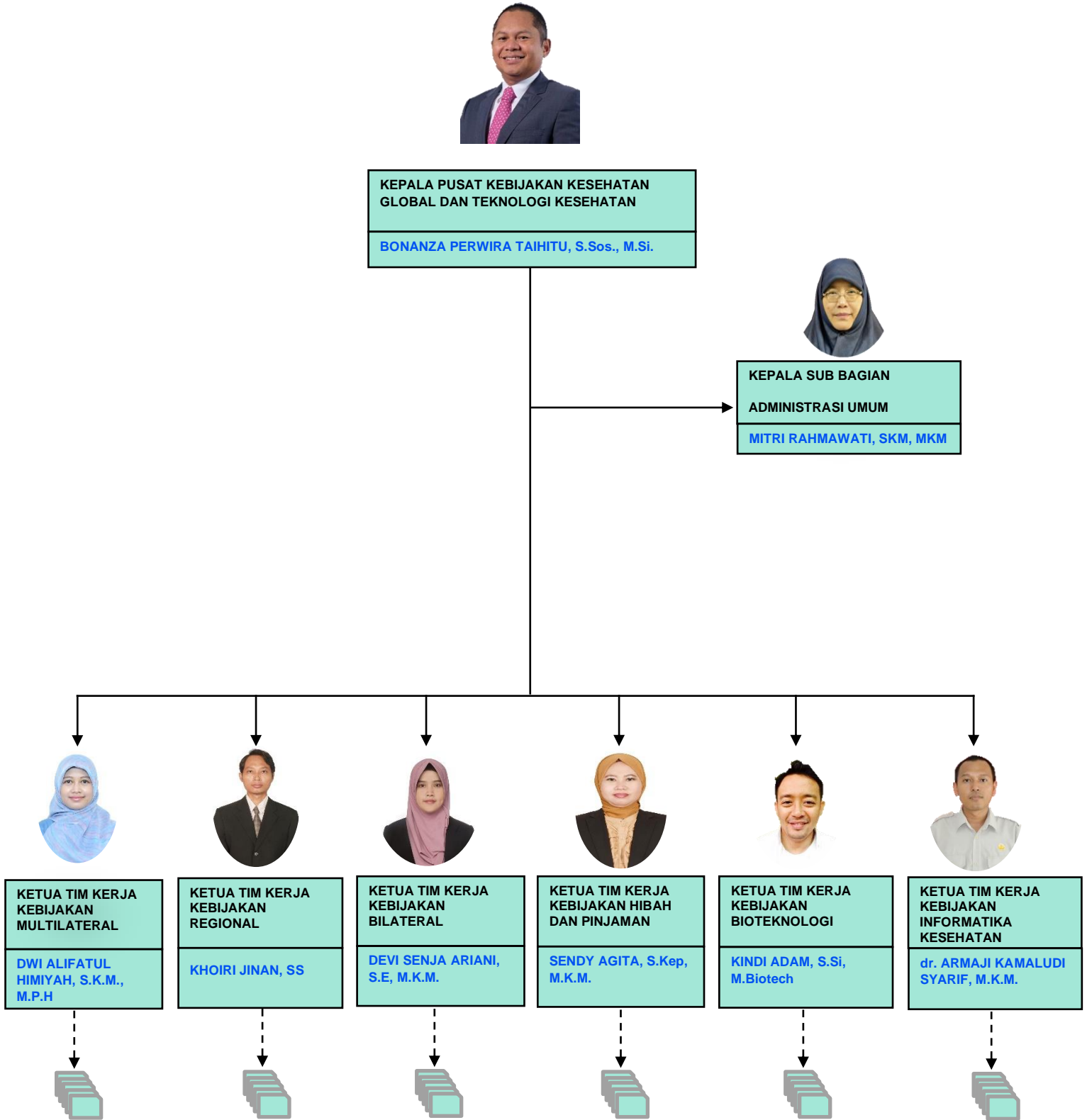
- 1) Pemetaan dan peninjauan kerja sama luar negeri berkoordinasi dengan unit kerja terkait;
- 2) Fasilitasi hubungan kerja sama luar negeri dalam kerangka koordinasi pelaksanaan kerja sama bilateral, regional, dan multilateral;
- 3) Diplomasi dan negosiasi dengan negara mitra, organisasi internasional dan entitas internasional lainnya;
- 4) Penyusunan dokumen kerja sama luar negeri dan kertas posisi berkoordinasi dengan unit kerja terkait; dan
- 5) Monitoring evaluasi implementasi kerja sama luar negeri berkoordinasi dengan unit kerja terkait.

Dalam rangka melaksanakan tugas-tugas tersebut, Kepala Pusjak KGTK berkoordinasi dengan unit kerja terkait di lingkungan Kementerian Kesehatan dan secara teknis bertanggung jawab serta wajib memberikan laporan secara berkala dan sewaktu-waktu kepada Menteri Kesehatan melalui Kepala Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan.

Pusat Kebijakan Kesehatan Global dan Teknologi Kesehatan dipimpin oleh seorang Kepala Pusat sebagai Jabatan Tinggi Pratama. Jabatan struktural lainnya adalah Kepala Sub Bagian Administrasi Umum yang bertanggung jawab kepada Kepala Pusjak KGTK. Dalam melaksanakan tugas teknis sehari-hari, Kepala Pusjak KGTK dibantu oleh 6 (enam) Tim Kerja Kebijakan yang dipimpin oleh seorang ketua tim. Tim Kerja Kebijakan tersebut, antara lain:

- 1) Tim Kerja Kebijakan Multilateral;
- 2) Tim Kerja Kebijakan Regional;
- 3) Tim Kerja Kebijakan Bilateral;
- 4) Tim Kerja Kebijakan Hibah dan Pinjaman;
- 5) Tim Kerja Kebijakan Bioteknologi; dan
- 6) Tim Kerja Kebijakan Informatika Kesehatan.

Sub Bagian Administrasi Umum dalam melaksanakan tugas sehari-hari dibantu oleh berbagai macam jabatan fungsional tertentu dan jabatan pelaksana sesuai dengan tugas dan wewenangnya masing-masing. Struktur organisasi Pusjak KGTK selengkapnya dapat terlihat pada Gambar 2.1.



Gambar 2. 1. Struktur Organisasi Pusat Kebijakan Kesehatan Global dan Teknologi Kesehatan Tahun 2023

BAB III

RENCANA KERJA TAHUN 2023

3.1. Sasaran Strategis

Arah Kebijakan Kesehatan Nasional diketahui akan membawa penyelenggaraan kesehatan nasional menuju pada cakupan kesehatan semesta dengan akses dan mutu layanan yang prima, dengan penekanan pada penguatan pelayanan kesehatan dasar, serta mendorong adanya peningkatan upaya promotif dan preventif dengan memanfaatkan teknologi. Arah kebijakan Kementerian Kesehatan hingga 2024 merupakan penjabaran lebih lanjut dari arah kebijakan nasional tersebut dengan memperhatikan lingkungan kewenangan yang dimiliki oleh Kementerian Kesehatan. Arah kebijakan Kementerian Kesehatan menggambarkan perubahan cara dan lingkup kerja kementerian ke depan yang akan memasuki situasi penuh ketidakpastian dan dinamika, baik dalam bidang kesehatan maupun bidang lainnya yang mempengaruhi kesehatan. Perubahan tersebut dikonsepsikan sebagai Transformasi Kesehatan yang mencakup penguatan kontribusi Kementerian Kesehatan dalam perwujudan pelayanan kesehatan primer dan sekunder yang lebih baik, sistem ketahanan kesehatan, penyediaan SDM kesehatan yang berkualitas dan merata, perluasan cakupan sistem pembiayaan, serta digitalisasi pada sistem pelayanan kesehatan.

Arah kebijakan Kementerian Kesehatan kemudian dirumuskan dan/atau ditetapkan sejalan dengan transformasi kesehatan yang menjadi jiwa dari perubahan Renstra ini, yaitu dengan rumusan: “Menguatkan sistem kesehatan dengan meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan menuju cakupan kesehatan semesta, dengan penekanan pada penguatan pelayanan kesehatan dasar (*Primary Health Care*), melalui penyediaan pelayanan kesehatan primer dan sekunder yang berkualitas, sistem ketahanan kesehatan yang tangguh, SDM kesehatan yang kompeten, sistem pembiayaan kesehatan yang efektif, serta penyelenggaraan kesehatan dengan tata kelola pemerintahan yang baik, didukung oleh inovasi dan pemanfaatan teknologi”.

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi Presiden serta mendukung kebijakan nasional, Kementerian Kesehatan dalam Rencana Strategisnya telah menyusun kebijakan dan strategi hingga 2024. Kebijakan dan strategi ini menjadi acuan dalam menyusun program Kementerian Kesehatan hingga 2024, yang merupakan operasionalisasi dari tujuan dan sasaran strategis Kementerian Kesehatan yang sudah disusun sebelumnya. Kebijakan dan strategi Kementerian Kesehatan dirumuskan sebagai perwujudan dari transformasi kesehatan yang mencakup transformasi enam pilar pada (1) pelayanan kesehatan primer, (2) pelayanan kesehatan rujukan, (3) sistem ketahanan kesehatan, (4) pembiayaan kesehatan, (5) SDM kesehatan, dan (6) teknologi kesehatan. Target kinerja Kementerian Kesehatan hingga 2024 akan menjadi acuan dalam menghadapi tantangan kesehatan yang sangat dinamis.

Transformasi Kesehatan merupakan sebuah program yang diinisiasi oleh Kementerian Kesehatan bertujuan untuk memperbaiki sistem kesehatan agar lebih kuat, tangguh dan mandiri dalam menghadapi ancaman kesehatan di masa depan. Transformasi Kesehatan tersebut terdiri dari 6 (enam) pilar, antara lain:

Pilar 1: Transformasi Layanan Primer

Pilar ini berfokus memperkuat aktivitas promotif preventif untuk menciptakan lebih banyak orang sehat, memperbaiki skrining kesehatan serta meningkatkan kapasitas layanan primer. Dengan kata lain, pilar ini bertujuan mendekatkan pelayanan kesehatan yang berkualitas pada masyarakat melalui integrasi pelayanan kesehatan primer yang berfokus pada siklus hidup (ibu hamil, anak remaja, usia produktif, dan lanjut usia).

Pilar 2: Transformasi Layanan Rujukan

Pilar ini berfokus pada peningkatan dalam hal kualitas serta pemerataan layanan kesehatan di seluruh pelosok yang ada di Indonesia. Adapun dalam penerapannya, hal yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan tersebut adalah dengan melakukan peningkatan akses dan mutu layanan sekunder dan tersier melalui pembangunan rumah sakit di kawasan timur Indonesia, melakukan jejaring dengan 6 layanan unggulan, dan melakukan kemitraan dengan “*World’s Top Healthcare Centers*”. Selain itu, pilar ini juga berfokus pada peningkatan kualitas layanan melalui perbaikan tata kelola rumah sakit serta kerja sama dengan institusi global melalui program *sister hospital*, peningkatan akses rujukan untuk penyakit katastropik (contoh jantung, stroke, kanker, ginjal), serta kesehatan ibu dan anak.

Pilar 3: Transformasi Sistem Ketahanan Kesehatan

Pilar ini memegang peran penting untuk mempertahankan sistem kesehatan yang baik di tengah ancaman kesehatan global. Hal ini juga mencakup pembuatan atau produksi hingga distribusi farmasi dan alat kesehatan yang lancar dan bisa diproduksi di dalam negeri. Upaya untuk mencapai kemandirian farmasi dan alat kesehatan tersebut diwujudkan dengan pengembangan vaksin, bahan baku obat, produk biologi, produk derivat plasma, alat kesehatan (termasuk *in vitro diagnostic*), dan produk natural (fitofarmaka) dalam negeri.

Pilar 4: Transformasi Sistem Pembiayaan Kesehatan

Pilar ini memiliki fokus untuk memberikan kemudahan dan kesetaraan akses layanan kesehatan, terutama kepada masyarakat yang termasuk dalam golongan kurang mampu. Pada regulasi pembiayaan kesehatan, terdapat 3 tujuan yang ingin dicapai, antara lain dengan memastikan ketersediaan, memastikan kecukupan dan berkelanjutan serta teralokasi dengan adil, dan yang terakhir adalah memastikan pemanfaatan yang efektif dan efisien.

Pilar 5: Transformasi SDM Kesehatan

Pilar ini berfokus untuk memastikan pemerataan distribusi para tenaga kesehatan di seluruh pelosok tanah air Indonesia, termasuk di kawasan Daerah Terpencil Perbatasan Kepulauan (DTPK). Adapun dalam penerapannya, pemerintah akan melakukan penambahan kuota mahasiswa, beasiswa dalam dan luar negeri, serta melakukan kemudahan pada penyertaan tenaga kesehatan yang lulus dari universitas luar negeri.

Pilar 6: Teknologi Kesehatan

Pilar ini bertujuan untuk melakukan pemanfaatan teknologi informasi dan bioteknologi yang berada di sektor kesehatan sehingga akan membuat dunia kesehatan di Indonesia dapat lebih beradaptasi dan memanfaatkan perkembangan teknologi digital dengan baik, agar proses digitalisasi di sektor kesehatan dapat menjadi lebih bertumbuh. Selain itu, pilar ini juga bertujuan agar dapat mengembangkan teknologi yang terintegrasi antarsistem, *interoperable*, dan terstandarisasi. Kemenkes berfokus pada 2 hal, yaitu teknologi informasi dan bioteknologi, dimulai dengan:

- 1) Aplikasi SATUSEHAT sebagai penghubung ekosistem data kesehatan Indonesia, terdiri dari SATUSEHAT Data, SATUSEHAT Platform (*Indonesia Health Services*), SATUSEHAT Mobile, SATUSEHAT SDM, dan akan terus berkembang untuk mendukung inovasi kesehatan berbasis data individu di Indonesia.
- 2) *Biomedical and Genome Science Initiative* (BGSi) sebagai *enabler* percepatan pertumbuhan riset dan inovasi di bidang bioteknologi yang dipimpin oleh Kemenkes melalui penerapan Bioregistry, Bioinformatika, dan Biobank untuk inovasi atas prediksi penyakit hingga pengobatan 10 penyakit prioritas.

Enam pilar transformasi kesehatan tersebut juga menjadi landasan penting bagi BKPK dalam melaksanakan perumusan dan pemberian rekomendasi kebijakan, advokasi, serta evaluasi kebijakan yang difokuskan dalam penjabaran pelaksanaan tugas di 4 unit kerja/Pusat Kebijakan. Pusjak Kesehatan Global dan Teknologi Kesehatan sendiri berfokus pada pilar keenam yaitu pilar teknologi kesehatan. Dalam rangka melaksanakan tugas-tugas tersebut, Kepala Pusjak KGTK berkoordinasi dengan unit kerja terkait di lingkungan Kementerian Kesehatan dan secara teknis bertanggung jawab serta wajib memberikan laporan secara berkala dan sewaktu-waktu kepada Menteri Kesehatan melalui Kepala Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan.

3.2. Indikator Kinerja Program (IKP) dan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)

Pusat Kebijakan Kesehatan Global dan Teknologi Kesehatan merupakan Unit Eselon II di lingkungan Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan yang mempunyai tugas melaksanakan analisis, perumusan rekomendasi, dan evaluasi kebijakan di bidang kesehatan global dan teknologi Kesehatan. Renstra Kementerian Kesehatan Tahun 2020–2024 menyebutkan bahwa sasaran program adalah meningkatnya kebijakan kesehatan berbasis bukti dengan indikator kinerja program terbangunnya tatakelola kerja sama internasional yang efektif. Sasaran kegiatan perumusan kebijakan kesehatan global dan teknologi kesehatan adalah meningkatnya kebijakan kesehatan global dan teknologi kesehatan berbasis bukti, dengan beberapa Indikator Kinerja Kegiatan.

Rincian target indikator kinerja program Pusat Kebijakan Kesehatan Global dan Teknologi Kesehatan tahun 2023 berdasarkan Rencana Strategis Kementerian Kesehatan tahun 2020–2024 dapat dilihat pada Tabel 3.1.

Tabel 3. 1. Indikator Kinerja Program Pusat Kebijakan Kesehatan Global dan Teknologi Kesehatan berdasarkan Rencana Strategis Kementerian Kesehatan Tahun 2022 – 2024

Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Target		
		2022	2023	2024
Meningkatnya kebijakan kesehatan berbasis bukti	Terbangunnya tatakelola kerjasama internasional yang efektif	1	1	1

Rincian target indikator kinerja kegiatan Pusat Kebijakan Kesehatan Global dan Teknologi Kesehatan tahun 2022–2024 berdasarkan Rencana Strategis tahun 2020–2024 dapat dilihat pada Tabel 3.2.

Tabel 3. 2. Indikator Kinerja Kegiatan Pusat Kebijakan Kesehatan Global dan Teknologi Kesehatan berdasarkan Rencana Strategis Kementerian Kesehatan Tahun 2022 – 2024

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target		
		2022	2023	2024
Meningkatnya kebijakan Kesehatan Global dan Teknologi Kesehatan berbasis bukti	1. Tersusunnya <i>blueprint</i> pengelolaan kerjasama internasional berdasarkan kriteria negara dan lembaga	1	1	1
	2. Jumlah dokumen kerjasama internasional, termasuk perjanjian dan prakarsa hasil diplomasi kesehatan	10	10	10
	3. Persentase keputusan atau peraturan di atas peraturan menteri yang disusun berbasis kajian dan bukti	50	75	100
	4. Persentase keputusan atau peraturan menteri yang disusun berbasis kajian dan bukti	50	75	100
	5. Persentase keputusan atau peraturan di bawah peraturan menteri yang disusun berbasis kajian dan bukti	50	75	100

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target		
		2022	2023	2024
	6. Persentase kebijakan kesehatan yang disusun berdasarkan rekomendasi kebijakan di bidang kesehatan global dan teknologi kesehatan	50	80	100
	7. Persentase kabupaten/kota yang mengadopsi kebijakan transformasi kesehatan	25	50	100

3.3. Capaian Indikator Kinerja Kegiatan Pusjak KGTK Tahun 2022

Adapun capaian Indikator Kinerja Kegiatan Pusat Kebijakan Kesehatan Global dan Teknologi Kesehatan pada tahun 2022 terlihat pada Tabel 3.3.

Tabel 3. 3. Sandingan Capaian Indikator Kinerja Kegiatan Pusat Kebijakan Kesehatan Global dan Teknologi Kesehatan Tahun 2022

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Tahun 2022		
		T	C	%
Meningkatnya kebijakan Kesehatan Global dan Teknologi Kesehatan berbasis bukti	1. Tersusunnya <i>blueprint</i> pengelolaan kerja sama internasional berdasarkan kriteria negara dan lembaga	1	1	100,0
	2. Jumlah dokumen kerja sama internasional, termasuk perjanjian dan prakarsa hasil diplomasi kesehatan	10	28	280,0
	3. Persentase keputusan atau peraturan di atas peraturan menteri yang disusun berbasis kajian dan bukti	50	N/A	N/A
	4. Persentase keputusan atau peraturan menteri yang disusun berbasis kajian dan bukti	50	50	100,0
	5. Persentase keputusan atau peraturan di bawah peraturan menteri yang disusun berbasis kajian dan bukti	50	50	100,0

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Tahun 2022		
		T	C	%
	6. Persentase kebijakan kesehatan yang disusun berdasarkan rekomendasi kebijakan di bidang kesehatan global dan teknologi kesehatan	50	10	20,0
	7. Persentase kabupaten/kota yang mengadopsi kebijakan transformasi kesehatan	25	59	236,0

T: Target, C: Capaian

Tabel 3.3 menunjukkan bahwa pada tahun 2022, capaian indikator tersusunnya *blueprint* pengelolaan kerjasama internasional berdasarkan kriteria negara dan lembaga sebanyak 1 dokumen *blueprint* (100,0% dari target), jumlah dokumen kerjasama internasional, termasuk perjanjian dan prakarsa hasil diplomasi kesehatan pada tahun 2022 sebanyak 28 dokumen kerjasama (280,0% dari target), persentase keputusan atau peraturan di atas peraturan menteri yang disusun berbasis kajian dan bukti pada tahun 2022 *Not Available*, persentase keputusan atau peraturan menteri yang disusun berbasis kajian dan bukti pada tahun 2022 sebanyak 50% (100,0% dari target), persentase keputusan atau peraturan di bawah peraturan menteri yang disusun berbasis kajian dan bukti pada tahun 2022 sebesar 50% (100,0% dari target), persentase kebijakan kesehatan yang disusun berdasarkan rekomendasi kebijakan di bidang kesehatan global dan teknologi kesehatan dan pada tahun 2022 sebesar 10% (20,0% dari target), persentase kabupaten/kota yang mengadopsi kebijakan transformasi kesehatan pada tahun 2022 capaiannya sebesar 59% (236,0% dari target). Capaian hasil kinerja pada tahun 2022 tersebut akan dijadikan bahan evaluasi untuk perencanaan

3.4. Perjanjian Kinerja

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara No. 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, menyebutkan bahwa Perjanjian Kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Dokumen Perjanjian Kinerja Pusat Kebijakan Kesehatan Global dan Teknologi Kesehatan menyebutkan bahwa Kepala Pusat Kebijakan Kesehatan Global dan Teknologi Kesehatan sebagai pihak yang menerima amanah/ tanggung jawab/ kinerja dengan Kepala Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan sebagai pihak yang memberi Amanah.

Perjanjian Kinerja disusun dengan mempertimbangkan Rencana Strategis Kemenkes 2020–2024 dan Rencana Aksi Kegiatan Pusat Kebijakan Kesehatan Global dan Teknologi Kesehatan. Alokasi akhir Pusjak KGTK tahun anggaran 2023 yang tercatat di dalam dokumen Perjanjian Kinerja adalah sebesar Rp47.531.837.000 terdiri dari

anggaran kegiatan perumusan kebijakan Kesehatan global dan teknologi Kesehatan sebesar Rp42.870.824.000 dan kegiatan dukungan manajemen pelaksanaan program sebesar Rp4.661.013.000. selain itu, di dalam dokumen Perjanjian Kinerja tahun 2023 telah ditetapkan target indikator kinerja kegiatan yang harus dicapai Pusjak KGTK selama tahun 2023. Selengkapnya dapat dilihat pada Tabel 2.3.

Tabel 3. 4. Indikator Kinerja Kegiatan Pusat Kebijakan Kesehatan Global dan Teknologi Kesehatan Tahun 2023

Sasaran Program/ Kegiatan	Indikator	Target
1. Meningkatnya kebijakan Kesehatan Global dan Teknologi Kesehatan berbasis bukti	1. Tersusunnya <i>blueprint</i> pengelolaan kerjasama internasional berdasarkan kriteria negara dan lembaga	1
	2. Jumlah dokumen kerjasama internasional, termasuk perjanjian dan prakarsa hasil diplomasi kesehatan	10
	3. Persentase keputusan atau peraturan di atas peraturan menteri yang disusun berbasis kajian dan bukti	75
	4. Persentase keputusan atau peraturan menteri yang disusun berbasis kajian dan bukti	75
	5. Persentase keputusan atau peraturan di bawah peraturan menteri yang disusun berbasis kajian dan bukti	75
	6. Persentase kebijakan kesehatan yang disusun berdasarkan rekomendasi kebijakan di bidang kesehatan global dan teknologi kesehatan	80
	7. Persentase kabupaten/kota yang mengadopsi kebijakan transformasi kesehatan	50
2. Meningkatnya dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya	1. Persentase realisasi anggaran BKPK	95

3.5. Rencana Kerja (Renja K/L) Pusat Kebijakan Kesehatan Global dan Teknologi Kesehatan Tahun 2023

Berdasarkan dokumen Renja K/L 2023, Pusjak KGTK memiliki 2 kegiatan, meliputi perumusan kebijakan kesehatan global dan teknologi Kesehatan dan dukungan manajemen pelaksanaan program di Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan. Pagu Alokasi Anggaran masing-masing kegiatan berdasarkan surat Sekretaris BKPK Nomor PR.04.01/4/5056/2022 tanggal 9 Agustus 2023 hal distribusi pagu anggaran BKPK TA 2023 dapat dilihat pada Tabel 3.5.

Tabel 3. 5. Indikator Kinerja Kegiatan Pusat Kebijakan Kesehatan Global dan Teknologi Kesehatan Tahun 2023

Kode	Unit Kerja/ Kegiatan/ Klasifikasi Rincian Output	Alokasi Anggaran (Rp)
	Pusat Kebijakan Kesehatan Global dan Teknologi Kesehatan	45.395.051.000
6836	Perumusan Kebijakan Kesehatan Global dan Teknologi Kesehatan	39.836.202.000
ABG	Kebijakan Bidang Kesehatan	6.469.980.000
AEA	Koordinasi	3.394.158.000
AEC	Kerja Sama	20.459.036.000
AEG	Konferensi dan Event	8.930.841.000
AEH	Promosi	582.187.000
6797	Dukungan Manajemen Pelaksanaan Program di Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan	5.558.849.000
CAN	Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi	504.680.000
EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal	3.103.293.000
EBB	Layanan Sarana dan Prasarana	310.000.000
EBC	Layanan Manajemen SDM Internal	649.194.000
EBD	Layanan Manajemen Kinerja Internal	991.682.000

BAB IV

MONITORING DAN EVALUASI

4.1. Monitoring

Monitoring atau yang biasa dikenal dengan pemantauan merupakan proses rutin pengumpulan data dan pengukuran kemajuan atas program atau kegiatan yang sedang dilaksanakan dengan cara memantau perubahan yang berfokus pada proses dan output. Pemantauan dianggap sebagai salah satu unsur penting dalam pelaksanaan setiap program dan kegiatan karena akan memberikan informasi mengenai proses dan tahapan-tahapan pelaksanaan kegiatan, serta mengidentifikasi kendala-kendala dan intervensi yang diperlukan dalam upaya perbaikan pelaksanaan kegiatan di masa yang akan datang. Dengan demikian, pelaksanaan kegiatan di masing-masing Unit Kerja di lingkungan BKPK dapat dilakukan lebih efektif.

Pelaksanaan pemantauan di lingkungan Pusjak KGTK dilakukan terhadap output berupa barang/jasa yang dihasilkan dari kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian Indikator Kinerja Kegiatan (IKK). Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) merupakan tugas dan fungsi yang targetnya harus dicapai oleh Unit Kerja Eselon II. IKK merupakan alat ukur pencapaian output/kinerja kegiatan yang mendukung program.

Secara hirarki di lingkungan Pusjak KGTK sebagai Unit Kerja Eselon II di bawah BKPK, kegiatan pemantauan dimulai dari pengukuran capaian kinerja kegiatan pertriwulan dari seluruh tim kerja untuk selanjutnya dihasilkan informasi kinerja yang dapat menjadi input pada siklus manajemen perencanaan.

4.2. Evaluasi

Evaluasi merupakan serangkaian kegiatan atau aktivitas yang bertujuan untuk dapat mengukur tingkat keberhasilan pada suatu program atau kegiatan. Pada umumnya, evaluasi berfokus pada tiga hal, meliputi:

- 1) *Output*: Kuantitas dan kualitas hasil kebijakan/program /kegiatan
- 2) *Outcome*: Akibat langsung/*Intermediate effect* kepada penerima manfaat
- 3) *Impact*: Jangka panjang/ *long-term*, cakupan dan kemajuannya luas/*widespread improvement* di kalangan masyarakat/*society*

Pelaksanaan monitoring dan evaluasi (monev) dilakukan terhadap indikator kinerja yang terdapat di dalam RAK dan Renja, sebagai berikut:

- 1) Indikator Kinerja Program (IKP) Indikator Kinerja Program, merupakan ukuran pencapaian outcome/kinerja program. IKP berasal dari indikator kinerja kegiatan terpenting. Indikator kinerja program merupakan satu/lebih indikator kinerja kegiatan terpenting yang diangkat menjadi IKP. IKP merupakan alat untuk mengukur pencapaian kinerja di tingkat eselon I yang pencapaiannya sesuai tugas dan fungsi eselon I; dan
- 2) Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) IKK merupakan output yang berupa barang/jasa yang dihasilkan oleh kegiatan/kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian outcome program/IKP. IKK secara akuntabilitas merupakan tugas dan fungsi unit kerja

eselon II. IKK merupakan alat ukur pencapaian output/kinerja kegiatan yang mendukung program.

Pusjak KGTK bertugas mengkoordinasikan seluruh tim kerja di bawahnya untuk melaksanakan monitoring dan evaluasi (monev) dari target kinerja yang telah ditetapkan melalui pendelegasian tugas dari Kepala Pusjak KGTK kepada penanggung jawab monev, dalam hal ini adalah fungsional perencana, Pada tahapan ini dilakukan koordinasi dan kerjasama dari seluruh penanggung jawab kegiatan di masing-masing tim kerja dengan melaporkan kemajuan/*progress* kegiatan yang sedang dan atau telah dilakukan pertriwulan(rekonsiliasi internal). Hasil dari monev tersebut diserahkan atau dilaporkan secara berjenjang kepada Unit Utama Eselon I, dalam hal ini adalah Tim Kerja Program dan Anggaran, Sekretariat BKPK sebelum tanggal 10 setiap bulannya.

Tabel 4. 1.Tahapan Monitoring dan Evaluasi Pusat Kebijakan Kesehatan Global dan Teknologi Kesehatan

Tahapan	Monitoring				Evaluasi
	TW I	TW II	TW III	TW IV	
Pengisian Data melalui Form CHE per Triwulan	2 April	2 Juli	2 Oktober	2 Desember	Finalisasi data kinerja triwulan IV (5 Januari tahun berikutnya)
Penyusunan Data Tindak Lanjut Triwulan melalui Form TL CHE	2 Mei	2 Agustus	2 November	2 Januari tahun berikutnya	Finalisasi data kinerja triwulan IV (5 Januari Tahun berikutnya)
Capaian Persentase Progress IKP dan IKK (matriks sandingan)	2 April	2 Juli	2 Oktober	2 Desember	Finalisasi data kinerja triwulan IV (5 Januari Tahun berikutnya)
Input data e-monev DJA	setiap bulan per tanggal 5 kecuali bulan Desember akan diinput paling lambat tanggal 5 Januari tahun berikutnya				
input data e-monev Bappenas	setiap bulan per tanggal 5 kecuali bulan Desember akan diinput paling lambat tanggal 5 Januari tahun berikutnya				
Input data e-Performance	5 April	5 Juli	5 Oktober	5 Januari tahun berikutnya	
Capaian Output IKP*	Monitoring progress capaian dilakukan per triwulan				Akhir Tahun
Capaian Output IKK*	Monitoring progress capaian dilakukan per triwulan				Akhir Tahun

BAB V

PENUTUP

Dokumen RKT ini diharapkan dapat membangun komitmen seluruh jajaran Pusjak KGTK dalam upayanya mencapai target kinerja yang telah ditetapkan dan dapat memberikan hasil yang berkualitas, serta melakukan inovasi dan terobosan yang lebih inovatif bagi peningkatan kinerja di masa yang akan datang. Beberapa upaya yang dapat dilakukan antara lain: mengidentifikasi regulasi/kebijakan yang dihasilkan di awal tahun, meningkatkan kompetensi SDM terkait diplomasi kesehatan global, serta pengembangan mekanisme pemantauan yang efektif, sehingga kerja sama internasional di bidang kesehatan dapat berperan secara optimal dalam membangun kesehatan global dan mencapai tujuan transformasi kesehatan. Selain itu, dokumen RKT ini diharapkan dapat menjadi acuan untuk keselarasan antara perencanaan dan anggaran dengan pelaksanaan program dan kegiatan Pusjak KGTK, serta menjadi pedoman dalam pelaksanaan monitoring dan evaluasi.

Demikian dokumen RKT Pusjak KGTK tahun 2023 ini kami buat. Kami sampaikan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi terhadap penyusunan dokumen ini. Masukan serta saran yang membangun untuk perbaikan dokumen ini tentunya sangat kami harapkan.

LAMPIRAN

1. Renja K/L Pusjak KGTK Tahun 2023

REKAP 3: KEGIATAN K/L

RENCANA KERJA KEMENTERIAN/LEMBAGA (RENJA K/L)

TAHUN ANGGARAN 2023

1. KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN KESEHATAN
2. PROGRAM : DS - Program Kebijakan Pembangunan Kesehatan
3. SASARAN PROGRAM : 01 - Meningkatnya kebijakan kesehatan berbasis bukti
4. KEGIATAN : 6836 - Perumusan Kebijakan Kesehatan Global dan Teknologi Kesehatan
5. UNIT ORGANISASI (ESELON 2) : 10 - Pusat Kebijakan Kesehatan Global dan Teknologi Kesehatan
03 - Pusat Kebijakan Kesehatan Global dan Teknologi Kesehatan

6. SASARAN KEGIATAN

KODE	SASARAN KEGIATAN / INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK)	TARGET 2023	ALOKASI 2023 (RIBU)
01	Meningkatnya kebijakan Kesehatan Global dan Teknologi Kesehatan berbasis bukti		39.836.202,0
01.01	Persentase keputusan atau peraturan diatas peraturan Menteri yang disusun berbasis kajian dan bukti	75	
01.02	Persentase keputusan atau peraturan Menteri yang disusun berbasis kajian dan bukti	75	
01.03	Persentase keputusan atau peraturan dibawah peraturan Menteri yang disusun berbasis kajian dan bukti	75	
01.04	Persentase kebijakan kesehatan yang disusun berdasarkan rekomendasi kebijakan di bidang Kesehatan Global dan Teknologi Kesehatan	80	
01.05	Persentase kabupaten/kota yang mengadopsi kebijakan transformasi kesehatan	50	
01.06	Tersusunnya blue print pengelolaan kerjasama internasional berdasarkan kriteria negara dan lembaga	1	
01.07	Jumlah dokumen kerjasama internasional, termasuk perjanjian dan prakarsa hasil diplomasi kesehatan	10	
Total			39.836.202,0

7. RINCIAN KEGIATAN

A. PEMETAAN KEGIATAN

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	LOKASI		NAWACITA	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	PROYEK PRIORITAS	DUKUNGAN (TEMATIK)	100 JANJI PRESIDEN	ALOKASI (RP RIBU)
		PROVINSI	KABUPATEN / KOTA								
01	<i>Meningkatnya kebijakan Kesehatan Global dan Teknologi Kesehatan berbasis bukti</i>										39.836.202,0
01.ABG	Kebijakan Bidang Kesehatan										6.469.980,0
01.ABG.001	Rekomendasi kebijakan posisi Indonesia sebagai Troika G20 2023 (HS)								006 - Anggaran Kesehatan		371.150,0
	701 - Analisis Kebijakan posisi Indonesia sebagai Troika G20 2023										195.850,0
		Provinsi DKI Jakarta	Kota Administrasi Jakarta Pusat								195.850,0
	702 - Advokasi, Negosiasi, dan Pendampingan Kebijakan posisi Indonesia sebagai Troika G20 2023										175.300,0
		Provinsi DKI Jakarta	Kota Administrasi Jakarta Pusat								175.300,0
01.ABG.002	Rekomendasi kebijakan strategi untuk mendorong output keketuaan G20 bidang Kesehatan menjadi bagian dari Amandemen IHR 2005 dan instrumen baru untuk kesiapsiagaan dan respon pandemik (HS)								006 - Anggaran Kesehatan		371.150,0

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	LOKASI		NAWACITA	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	PROYEK PRIORITAS	DUKUNGAN (TEMATIK)	100 JANJI PRESIDEN	ALOKASI (RP RIBU)
		PROVINSI	KABUPATEN / KOTA								
	701 - Analisis Kebijakan strategi untuk mendorong output keketuaan G20 bidang Kesehatan menjadi bagian dari Amandemen IHR 2005 dan instrumen baru untuk kesiapsiagaan dan respon pandemik										195.850,0
		Provinsi DKI Jakarta	Kota Administrasi Jakarta Pusat								195.850,0
	702 - Advokasi, Negosiasi, dan Pendampingan Kebijakan strategi untuk mendorong output keketuaan G20 bidang Kesehatan menjadi bagian dari Amandemen IHR 2005 dan instrumen baru untuk kesiapsiagaan dan respon pandemik										175.300,0
		Provinsi DKI Jakarta	Kota Administrasi Jakarta Pusat								175.300,0
01.ABG.003	Rekomendasi kebijakan untuk implementasi resolusi, WHO Regional Committee, World Health Assembly dan UN General Assembly di Indonesia (HS)								006 - Anggaran Kesehatan		387.540,0

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	LOKASI		NAWACITA	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	PROYEK PRIORITAS	DUKUNGAN (TEMATIK)	100 JANJI PRESIDEN	ALOKASI (RP RIBU)
		PROVINSI	KABUPATEN / KOTA								
	701 - Analisis Kebijakan implementasi resolusi, WHO Regional Committee, World Health Assembly dan UN General Assembly di Indonesia										198.380,0
		Provinsi DKI Jakarta	Kota Administrasi Jakarta Pusat								198.380,0
	702 - Advokasi, Negosiasi, dan Pendampingan Kebijakan implementasi resolusi, WHO Regional Committee, World Health Assembly dan UN General Assembly di Indonesia										189.160,0
		Provinsi DKI Jakarta	Kota Administrasi Jakarta Pusat								189.160,0
01.ABG.004	Rekomendasi Kebijakan posisi Indonesia terhadap kebijakan/inisiatif kesehatan global (HS)								006 - Anggaran Kesehatan		388.540,0
	701 - Analisis Kebijakan posisi Indonesia terhadap kebijakan/inisiatif kesehatan global										196.160,0
		Provinsi DKI Jakarta	Kota Administrasi Jakarta Pusat								196.160,0

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	LOKASI		NAWACITA	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	PROYEK PRIORITAS	DUKUNGAN (TEMATIK)	100 JANJI PRESIDEN	ALOKASI (RP RIBU)
		PROVINSI	KABUPATEN / KOTA								
	702 - Advokasi, Negosiasi, dan Pendampingan Kebijakan posisi Indonesia terhadap kebijakan/inisiatif kesehatan global										192.380,0
		Provinsi DKI Jakarta	Kota Administrasi Jakarta Pusat								192.380,0
01.ABG.005	Rekomendasi kebijakan Penyusunan Modul Kurikulum keahlian Robotic Telesurgery (LR)								006 - Anggaran Kesehatan		356.800,0
	701 - Analisis Kebijakan Penyusunan Modul Kurikulum keahlian Robotic Telesurgery										41.745,0
		Provinsi DKI Jakarta	Kota Administrasi Jakarta Pusat								41.745,0
	702 - Advokasi, Negosiasi, dan Pendampingan Kebijakan Penyusunan Modul Kurikulum keahlian Robotic Telesurgery										315.055,0
		Provinsi DKI Jakarta	Kota Administrasi Jakarta Pusat								315.055,0

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	LOKASI		NAWACITA	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	PROYEK PRIORITAS	DUKUNGAN (TEMATIK)	100 JANJI PRESIDEN	ALOKASI (RP RIBU)
		PROVINSI	KABUPATEN / KOTA								
01.ABG.006	Rekomendasi Kebijakan Sistem Akreditasi dan Sertifikasi Pelatihan Keahlian Robotic Telesurgery (LR)								006 - Anggaran Kesehatan		355.750,0
	701 - Analisis Kebijakan Sistem Akreditasi dan Sertifikasi Pelatihan Keahlian Robotic Telesurgery										41.745,0
		Provinsi DKI Jakarta	Kota Administrasi Jakarta Pusat								41.745,0
	702 - Advokasi, Negosiasi, dan Pendampingan Kebijakan Sistem Akreditasi dan Sertifikasi Pelatihan Keahlian Robotic Telesurgery										314.005,0
		Provinsi DKI Jakarta	Kota Administrasi Jakarta Pusat								314.005,0
01.ABG.007	Rekomendasi kebijakan pembiayaan telediagnosis kedalam sistem JKN (PK)								006 - Anggaran Kesehatan		348.270,0
	701 - Analisis Kebijakan pembiayaan telediagnosis kedalam sistem JKN										39.510,0
		Provinsi DKI Jakarta	Kota Administrasi Jakarta Pusat								39.510,0

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	LOKASI		NAWACITA	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	PROYEK PRIORITAS	DUKUNGAN (TEMATIK)	100 JANJI PRESIDEN	ALOKASI (RP RIBU)
		PROVINSI	KABUPATEN / KOTA								
	702 - Advokasi, Negosiasi, dan Pendampingan Kebijakan pembiayaan telediagnosis kedalam sistem JKN										308.760,0
		Provinsi DKI Jakarta	Kota Administrasi Jakarta Pusat								308.760,0
01.ABG.008	Rekomendasi Kebijakan Pengembangan CoE RS Vertikal Kemenkes melalui kerja sama Sister Hospital (LR)								006 - Anggaran Kesehatan		333.995,0
	701 - Analisis Kebijakan Pengembangan CoE RS Vertikal Kemenkes melalui kerja sama Sister Hospital										41.235,0
		Provinsi DKI Jakarta	Kota Administrasi Jakarta Pusat								41.235,0
	702 - Advokasi, Negosiasi, dan Pendampingan Kebijakan Pengembangan CoE RS Vertikal Kemenkes melalui kerja sama Sister Hospital										292.760,0
		Provinsi DKI Jakarta	Kota Administrasi Jakarta Pusat								292.760,0

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	LOKASI		NAWACITA	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	PROYEK PRIORITAS	DUKUNGAN (TEMATIK)	100 JANJI PRESIDEN	ALOKASI (RP RIBU)
		PROVINSI	KABUPATEN / KOTA								
01.ABG.009	Rekomendasi Kebijakan menghasilkan Health Talent di sektor kesehatan melalui kerja sama Sister Hospital (LR)								006 - Anggaran Kesehatan		358.020,0
	701 - Analisis Kebijakan Health Talent di sektor kesehatan melalui kerja sama Sister Hospital										44.010,0
		Provinsi DKI Jakarta	Kota Administrasi Jakarta Pusat								44.010,0
	702 - Advokasi, Negosiasi, dan Pendampingan Kebijakan Health Talent di sektor kesehatan melalui kerja sama Sister Hospital										314.010,0
		Provinsi DKI Jakarta	Kota Administrasi Jakarta Pusat								314.010,0
01.ABG.010	Rekomendasi Penyusunan ATISA Sektor Jasa Kesehatan (HS)								006 - Anggaran Kesehatan		353.770,0
	701 - Analisis Kebijakan Penyusunan ATISA Sektor Jasa Kesehatan										45.010,0
		Provinsi DKI Jakarta	Kota Administrasi Jakarta Pusat								45.010,0

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	LOKASI		NAWACITA	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	PROYEK PRIORITAS	DUKUNGAN (TEMATIK)	100 JANJI PRESIDEN	ALOKASI (RP RIBU)
		PROVINSI	KABUPATEN / KOTA								
	702 - Advokasi, Negosiasi, dan Pendampingan Kebijakan Penyusunan ATISA Sektor Jasa Kesehatan										308.760,0
		Provinsi DKI Jakarta	Kota Administrasi Jakarta Pusat								308.760,0
01.ABG.011	Rekomendasi Kebijakan Penyusunan ASEAN POA Formulation and Production of Healthier Food and Beverages Options (TK)								006 - Anggaran Kesehatan		349.770,0
	701 - Analisis Kebijakan Penyusunan ASEAN POA Formulation and Production of Healthier Food and Beverages Options										41.010,0
		Provinsi DKI Jakarta	Kota Administrasi Jakarta Pusat								41.010,0
	702 - Advokasi, Negosiasi, dan Pendampingan Kebijakan Penyusunan ASEAN POA Formulation and Production of Healthier Food and Beverages Options										308.760,0
		Provinsi DKI Jakarta	Kota Administrasi Jakarta Pusat								308.760,0

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	LOKASI		NAWACITA	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	PROYEK PRIORITAS	DUKUNGAN (TEMATIK)	100 JANJI PRESIDEN	ALOKASI (RP RIBU)
		PROVINSI	KABUPATEN / KOTA								
01.ABG.012	Rekomendasi Kebijakan perdagangan distribusi obat produksi luar negeri (RF)								006 - Anggaran Kesehatan		352.770,0
	701 - Analisis Kebijakan perdagangan distribusi obat produksi luar negeri										41.010,0
		Provinsi DKI Jakarta	Kota Administrasi Jakarta Pusat								41.010,0
	702 - Advokasi, Negosiasi, dan Pendampingan Kebijakan perdagangan distribusi obat produksi luar negeri										311.760,0
		Provinsi DKI Jakarta	Kota Administrasi Jakarta Pusat								311.760,0
01.ABG.013	Rekomendasi Kebijakan Health Tourism (TK)								006 - Anggaran Kesehatan		354.215,0
	701 - Analisis Kebijakan Health Tourism										45.510,0
		Provinsi DKI Jakarta	Kota Administrasi Jakarta Pusat								45.510,0
	702 - Advokasi, Negosiasi, dan Pendampingan Kebijakan Health Tourism										308.705,0
		Provinsi DKI Jakarta	Kota Administrasi Jakarta Pusat								308.705,0

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	LOKASI		NAWACITA	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	PROYEK PRIORITAS	DUKUNGAN (TEMATIK)	100 JANJI PRESIDEN	ALOKASI (RP RIBU)
		PROVINSI	KABUPATEN / KOTA								
01.ABG.014	Rekomendasi Kebijakan Pengembangan Telemedicine dan Digital Health dengan mitra wicara (TK)								006 - Anggaran Kesehatan		349.020,0
	701 - Analisis Kebijakan Pengembangan Telemedicine dan Digital Health dengan mitra wicara										44.010,0
		Provinsi DKI Jakarta	Kota Administrasi Jakarta Pusat								44.010,0
	702 - Advokasi, Negosiasi, dan Pendampingan Kebijakan Pengembangan Telemedicine dan Digital Health dengan mitra wicara										305.010,0
		Provinsi DKI Jakarta	Kota Administrasi Jakarta Pusat								305.010,0
01.ABG.015	Rekomendasi Kebijakan Pengelolaan Hibah dan Pinjaman Luar Negeri (TK)								006 - Anggaran Kesehatan		368.850,0
	701 - Analisis Kebijakan Pengelolaan Hibah dan Pinjaman Luar Negeri										189.550,0
		Provinsi DKI Jakarta	Kota Administrasi Jakarta Pusat								189.550,0

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	LOKASI		NAWACITA	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	PROYEK PRIORITAS	DUKUNGAN (TEMATIK)	100 JANJI PRESIDEN	ALOKASI (RP RIBU)
		PROVINSI	KABUPATEN / KOTA								
	702 - Advokasi, Negosiasi, dan Pendampingan Kebijakan Pengelolaan Hibah dan Pinjaman Luar Negeri										179.300,0
		Provinsi DKI Jakarta	Kota Administrasi Jakarta Pusat								179.300,0
01.ABG.016	Rekomendasi Kebijakan Pemanfaatan Hibah dan Pinjaman Luar Negeri dalam Mendukung Transformasi Kesehatan (TK)								006 - Anggaran Kesehatan		349.450,0
	701 - Analisis Kebijakan Pemanfaatan Hibah dan Pinjaman Luar Negeri dalam Mendukung Transformasi Kesehatan										177.350,0
		Provinsi DKI Jakarta	Kota Administrasi Jakarta Pusat								177.350,0
	702 - Advokasi, Negosiasi, dan Pendampingan Kebijakan Pemanfaatan Hibah dan Pinjaman Luar Negeri dalam Mendukung Transformasi Kesehatan										172.100,0
		Provinsi DKI Jakarta	Kota Administrasi Jakarta Pusat								172.100,0

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	LOKASI		NAWACITA	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	PROYEK PRIORITAS	DUKUNGAN (TEMATIK)	100 JANJI PRESIDEN	ALOKASI (RP RIBU)
		PROVINSI	KABUPATEN / KOTA								
01.ABG.017	Rekomendasi Kebijakan Pemanfaatan Vaksin Merah Putih untuk Kesehatan Global (RF)								006 - Anggaran Kesehatan		371.150,0
	701 - Analisis Kebijakan Pemanfaatan Vaksin Merah Putih untuk Kesehatan Global										195.850,0
		Provinsi DKI Jakarta	Kota Administrasi Jakarta Pusat								195.850,0
	702 - Advokasi, Negosiasi, dan Pendampingan Kebijakan Pemanfaatan Vaksin Merah Putih untuk Kesehatan Global										175.300,0
		Provinsi DKI Jakarta	Kota Administrasi Jakarta Pusat								175.300,0
01.ABG.018	Rekomendasi Kebijakan Pemanfaatan Telemedicine dan Digital Health untuk pelayanan Kesehatan (TK)								006 - Anggaran Kesehatan		349.770,0
	701 - Analisis Kebijakan Pemanfaatan Telemedicine dan Digital Health untuk pelayanan Kesehatan										41.010,0
		Provinsi DKI Jakarta	Kota Administrasi Jakarta Pusat								41.010,0

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	LOKASI		NAWACITA	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	PROYEK PRIORITAS	DUKUNGAN (TEMATIK)	100 JANJI PRESIDEN	ALOKASI (RP RIBU)
		PROVINSI	KABUPATEN / KOTA								
	702 - Advokasi, Negosiasi, dan Pendampingan Kebijakan Pemanfaatan Telemedicine dan Digital Health untuk pelayanan Kesehatan										308.760,0
		Provinsi DKI Jakarta	Kota Administrasi Jakarta Pusat								308.760,0
01.AEA	Koordinasi										3.394.158,0
01.AEA.001	Integrasi dan Sinergi dalam rangka pencapaian pembangunan kesehatan (TK)								006 - Anggaran Kesehatan		3.394.158,0
	702 - Serial meeting Perencanaan dan Implementasi Kebijakan										491.225,0
		Provinsi DKI Jakarta	Kota Administrasi Jakarta Pusat								491.225,0
	704 - Analisis cepat kebijakan dalam rangka percepatan pembangunan kesehatan										1.308.673,0
		Pusat	Pusat								300.888,0
		Provinsi DKI Jakarta	Kota Administrasi Jakarta Pusat								1.007.785,0
	705 - Evaluasi efektifitas dan implementasi kebijakan Kemenkes										1.594.260,0

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	LOKASI		NAWACITA	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	PROYEK PRIORITAS	DUKUNGAN (TEMATIK)	100 JANJI PRESIDEN	ALOKASI (RP RIBU)
		PROVINSI	KABUPATEN / KOTA								
		Provinsi DKI Jakarta	Kota Administrasi Jakarta Pusat								1.594.260,0
01.AEC	Kerja sama										20.459.036,0
01.AEC.001	Pendampingan kerja sama bilateral untuk mendorong produsen luar negeri melakukan investasi produksi di Indonesia/joint venture (HS)								006 - Anggaran Kesehatan		263.200,0
	701 - Persiapan Pendampingan kerja sama bilateral untuk mendorong produsen luar negeri melakukan investasi produksi di Indonesia/joint venture										60.360,0
		Provinsi DKI Jakarta	Kota Administrasi Jakarta Pusat								60.360,0
	702 - Pelaksanaan Pendampingan kerja sama bilateral untuk mendorong produsen luar negeri melakukan investasi produksi di Indonesia/joint venture										202.840,0
		Provinsi DKI Jakarta	Kota Administrasi Jakarta Pusat								202.840,0

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	LOKASI		NAWACITA	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	PROYEK PRIORITAS	DUKUNGAN (TEMATIK)	100 JANJI PRESIDEN	ALOKASI (RP RIBU)
		PROVINSI	KABUPATEN / KOTA								
01.AEC.002	Pengembangan skema kerjasama antara pemerintah dan mitra pembangunan luar dan dalam negeri (HS)								006 - Anggaran Kesehatan		268.548,0
	701 - Persiapan Pengembangan skema kerjasama antara pemerintah dan mitra pembangunan luar dan dalam negeri										65.548,0
		Provinsi DKI Jakarta	Kota Administrasi Jakarta Pusat								65.548,0
	702 - Pelaksanaan Pengembangan skema kerjasama antara pemerintah dan mitra pembangunan luar dan dalam negeri										203.000,0
		Provinsi DKI Jakarta	Kota Administrasi Jakarta Pusat								203.000,0
01.AEC.003	Dokumen Kerja Sama Luar Negeri Multilateral Bidang Kesehatan (HS)								006 - Anggaran Kesehatan		15.842.004,0
	701 - Penyusunan Dokumen Kerja Sama Luar Negeri Multilateral Bidang Kesehatan										15.645.624,0
		Provinsi DKI Jakarta	Kota Administrasi Jakarta Pusat								15.645.624,0

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	LOKASI		NAWACITA	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	PROYEK PRIORITAS	DUKUNGAN (TEMATIK)	100 JANJI PRESIDEN	ALOKASI (RP RIBU)
		PROVINSI	KABUPATEN / KOTA								
	702 - Koordinasi Interkementerian										103.260,0
		Provinsi DKI Jakarta	Kota Administrasi Jakarta Pusat								103.260,0
	703 - Monitoring Evaluasi Dokumen Kerja Sama Luar Negeri Multilateral Bidang Kesehatan										93.120,0
		Provinsi DKI Jakarta	Kota Administrasi Jakarta Pusat								93.120,0
01.AEC.004	Dokumen Kerja Sama Luar Negeri Regional dan Bilateral Bidang Kesehatan (HS)								006 - Anggaran Kesehatan		1.184.764,0
	701 - Penyusunan Dokumen Kerja Sama Luar Negeri Regional dan Bilateral Bidang Kesehatan										659.890,0
		Provinsi DKI Jakarta	Kota Administrasi Jakarta Pusat								659.890,0
	702 - Koordinasi Interkementerian										169.834,0
		Provinsi DKI Jakarta	Kota Administrasi Jakarta Pusat								169.834,0

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	LOKASI		NAWACITA	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	PROYEK PRIORITAS	DUKUNGAN (TEMATIK)	100 JANJI PRESIDEN	ALOKASI (RP RIBU)
		PROVINSI	KABUPATEN / KOTA								
	703 - Monitoring Evaluasi Dokumen Kerja Sama Luar Negeri Regional dan Bilateral Bidang Kesehatan										355.040,0
		Provinsi DKI Jakarta	Kota Administrasi Jakarta Pusat								355.040,0
01.AEC.005	Dokumen Kerja Sama Pinjaman Hibah Luar Negeri (HS)								006 - Anggaran Kesehatan		898.600,0
	701 - Penyusunan Dokumen Kerja Sama Pinjaman Hibah Luar Negeri										663.600,0
		Provinsi DKI Jakarta	Kota Administrasi Jakarta Pusat								663.600,0
	702 - Koordinasi Interkementerian										112.760,0
		Provinsi DKI Jakarta	Kota Administrasi Jakarta Pusat								112.760,0
	703 - Monitoring Evaluasi Dokumen Kerja Sama Pinjaman Hibah Luar Negeri										122.240,0
		Provinsi DKI Jakarta	Kota Administrasi Jakarta Pusat								122.240,0

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	LOKASI		NAWACITA	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	PROYEK PRIORITAS	DUKUNGAN (TEMATIK)	100 JANJI PRESIDEN	ALOKASI (RP RIBU)
		PROVINSI	KABUPATEN / KOTA								
01.AEC.006	Dokumen Kerja Sama Bioteknologi dan Informatika Kesehatan (TK)								006 - Anggaran Kesehatan		2.001.920,0
	701 - Penyusunan Dokumen Kerja Sama Bioteknologi dan Informatika Kesehatan										1.709.880,0
		Provinsi DKI Jakarta	Kota Administrasi Jakarta Pusat								1.709.880,0
	702 - Koordinasi Interkementerian										142.520,0
		Provinsi DKI Jakarta	Kota Administrasi Jakarta Pusat								142.520,0
	703 - Monitoring Evaluasi Dokumen Kerja Sama Bioteknologi dan Informatika Kesehatan										149.520,0
		Provinsi DKI Jakarta	Kota Administrasi Jakarta Pusat								149.520,0
01.AEG	Konferensi dan Event										8.930.841,0
01.AEG.001	Tuan Rumah Penyelenggaraan Pertemuan Internasional (HS)								006 - Anggaran Kesehatan		4.461.643,0
	701 - Persiapan Pertemuan Internasional										6.000,0

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	LOKASI		NAWACITA	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	PROYEK PRIORITAS	DUKUNGAN (TEMATIK)	100 JANJI PRESIDEN	ALOKASI (RP RIBU)
		PROVINSI	KABUPATEN / KOTA								
		Provinsi DKI Jakarta	Kota Administrasi Jakarta Pusat								6.000,0
	702 - Pelaksanaan Pertemuan Internasional										4.455.643,0
		Provinsi DKI Jakarta	Kota Administrasi Jakarta Pusat								4.455.643,0
01.AEG.002	Pertemuan Joint Working Group (HS)								006 - Anggaran Kesehatan		498.298,0
	701 - Persiapan Pertemuan Joint Working Group										6.750,0
		Provinsi DKI Jakarta	Kota Administrasi Jakarta Pusat								6.750,0
	702 - Pelaksanaan Pertemuan Joint Working Group										491.548,0
		Provinsi DKI Jakarta	Kota Administrasi Jakarta Pusat								491.548,0
01.AEG.003	Partisipasi aktif dalam Sidang Internasional Bilateral, Regional dan Multilateral Bidang Kesehatan (HS)								006 - Anggaran Kesehatan		3.372.760,0
	701 - Pelaksanaan Sidang/Pertemuan Internasional										3.372.760,0

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	LOKASI		NAWACITA	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	PROYEK PRIORITAS	DUKUNGAN (TEMATIK)	100 JANJI PRESIDEN	ALOKASI (RP RIBU)
		PROVINSI	KABUPATEN / KOTA								
		Provinsi DKI Jakarta	Kota Administrasi Jakarta Pusat								3.372.760,0
01.AEG.005	Eksplorasi potensi kerja sama untuk pengembangan BBO baru yang mempunyai pemakaian terbesar JKN (RF)								006 - Anggaran Kesehatan		390.910,0
	701 - Persiapan Eksplorasi potensi kerja sama untuk pengembangan BBO baru yang mempunyai pemakaian terbesar JKN										6.750,0
		Provinsi DKI Jakarta	Kota Administrasi Jakarta Pusat								6.750,0
	702 - Pelaksanaan Eksplorasi potensi kerja sama untuk pengembangan BBO baru yang mempunyai pemakaian terbesar JKN										384.160,0
		Provinsi DKI Jakarta	Kota Administrasi Jakarta Pusat								384.160,0
01.AEG.006	Pengembangan dan percepatan produksi obat bioteknologi dan fraksinasi plasma melalui sinergitas ABGC (RF)								006 - Anggaran Kesehatan		207.230,0

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	LOKASI		NAWACITA	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	PROYEK PRIORITAS	DUKUNGAN (TEMATIK)	100 JANJI PRESIDEN	ALOKASI (RP RIBU)
		PROVINSI	KABUPATEN / KOTA								
	701 - Persiapan Pengembangan dan percepatan produksi obat bioteknologi dan fraksionasi plasma melalui sinergitas ABGC pengembangan BBO baru yang mempunyai pemakaian terbesar JKN										18.990,0
		Provinsi DKI Jakarta	Kota Administrasi Jakarta Pusat								18.990,0
	702 - Pelaksanaan Pengembangan dan percepatan produksi obat bioteknologi dan fraksionasi plasma melalui sinergitas ABGC										188.240,0
		Provinsi DKI Jakarta	Kota Administrasi Jakarta Pusat								188.240,0
01.AEH	Promosi										582.187,0
01.AEH.001	Pelaksanaan Promosi dalam rangka mendorong investasi produksi alkes dalam negeri (RF)								006 - Anggaran Kesehatan		582.187,0
	701 - Persiapan Promosi dalam rangka mendorong investasi produksi alkes dalam negeri										4.500,0

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	LOKASI		NAWACITA	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	PROYEK PRIORITAS	DUKUNGAN (TEMATIK)	100 JANJI PRESIDEN	ALOKASI (RP RIBU)
		PROVINSI	KABUPATEN / KOTA								
		Provinsi DKI Jakarta	Kota Administrasi Jakarta Pusat								4.500,0
	702 - Pelaksanaan Promosi dalam rangka mendorong investasi produksi alkes dalam negeri										577.687,0
		Provinsi DKI Jakarta	Kota Administrasi Jakarta Pusat								577.687,0
Total											39.836.202,0

B. PERHITUNGAN PENDANAAN (TAHUN 2023 DAN PRAKIRAAN MAJU)

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	TAHUN 2023			PRAKIRAAN KEBUTUHAN (RIBU)						
		VOLUME / TARGET	SATUAN	SATUAN BIAYA	ALOKASI 2023 (RP RIBU)	VOLUME / TARGET			ALOKASI (RIBU)		
						2024	2025	2026	2024	2025	2026
01	Meningkatnya kebijakan Kesehatan Global dan Teknologi Kesehatan berbasis bukti				39.836.202,0				24.195.057,0	24.195.057,0	24.195.057,0
01.ABG	Kebijakan Bidang Kesehatan		Rekomendasi Kebijakan/ Kajian		6.469.980,0				6.503.685,0	6.503.685,0	6.503.685,0
01.ABG.001	Rekomendasi kebijakan posisi Indonesia sebagai Troika G20 2023 (HS)	1	Rekomendasi Kebijakan		371.150,0	1	1	1	371.150,0	371.150,0	371.150,0
01.ABG.001.701	Analisis Kebijakan posisi Indonesia sebagai Troika G20 2023	1,0	Kegiatan	195.850,0	195.850,0	1,0	1,0	1,0	195.850,0	195.850,0	195.850,0

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	TAHUN 2023			PRAKIRAAN KEBUTUHAN (RIBU)						
		VOLUME / TARGET	SATUAN	SATUAN BIAYA	ALOKASI 2023 (RP RIBU)	VOLUME / TARGET			ALOKASI (RIBU)		
						2024	2025	2026	2024	2025	2026
01.ABG.001.702	Advokasi, Negosiasi, dan Pendampingan Kebijakan posisi Indonesia sebagai Troika G20 2023	1,0	Kegiatan	175.300,0	175.300,0	1,0	1,0	1,0	175.300,0	175.300,0	175.300,0
01.ABG.002	Rekomendasi kebijakan strategi untuk mendorong output keketuaan G20 bidang Kesehatan menjadi bagian dari Amandemen IHR 2005 dan instrumen baru untuk kesiapsiagaan dan respon pandemik (HS)	1	Rekomendasi Kebijakan		371.150,0	1	1	1	371.150,0	371.150,0	371.150,0
01.ABG.002.701	Analisis Kebijakan strategi untuk mendorong output keketuaan G20 bidang Kesehatan menjadi bagian dari Amandemen IHR 2005 dan instrumen baru untuk kesiapsiagaan dan respon pandemik	1,0	Kegiatan	195.850,0	195.850,0	1,0	1,0	1,0	195.850,0	195.850,0	195.850,0
01.ABG.002.702	Advokasi, Negosiasi, dan Pendampingan Kebijakan strategi untuk mendorong output keketuaan G20 bidang Kesehatan menjadi bagian dari Amandemen IHR 2005 dan instrumen baru untuk kesiapsiagaan dan respon pandemik	1,0	Kegiatan	175.300,0	175.300,0	1,0	1,0	1,0	175.300,0	175.300,0	175.300,0
01.ABG.003	Rekomendasi kebijakan untuk implementasi resolusi, WHO Regional Committee, World Health Assembly dan UN General Assembly di Indonesia (HS)	1	Rekomendasi Kebijakan		387.540,0	1	1	1	387.540,0	387.540,0	387.540,0

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	TAHUN 2023			PRAKIRAAN KEBUTUHAN (RIBU)						
		VOLUME / TARGET	SATUAN	SATUAN BIAYA	ALOKASI 2023 (RP RIBU)	VOLUME / TARGET			ALOKASI (RIBU)		
						2024	2025	2026	2024	2025	2026
01.ABG.003.701	Analisis Kebijakan implementasi resolusi, WHO Regional Committee, World Health Assembly dan UN General Assembly di Indonesia	1,0	Kegiatan	198.380,0	198.380,0	1,0	1,0	1,0	198.380,0	198.380,0	198.380,0
01.ABG.003.702	Advokasi, Negosiasi, dan Pendampingan Kebijakan implementasi resolusi, WHO Regional Committee, World Health Assembly dan UN General Assembly di Indonesia	1,0	Kegiatan	189.160,0	189.160,0	1,0	1,0	1,0	189.160,0	189.160,0	189.160,0
01.ABG.004	Rekomendasi Kebijakan posisi Indonesia terhadap kebijakan/inisiatif kesehatan global (HS)	1	Rekomendasi Kebijakan		388.540,0	1	1	1	388.540,0	388.540,0	388.540,0
01.ABG.004.701	Analisis Kebijakan posisi Indonesia terhadap kebijakan/inisiatif kesehatan global	1,0	Kegiatan	196.160,0	196.160,0	1,0	1,0	1,0	196.160,0	196.160,0	196.160,0
01.ABG.004.702	Advokasi, Negosiasi, dan Pendampingan Kebijakan posisi Indonesia terhadap kebijakan/inisiatif kesehatan global	1,0	Kegiatan	192.380,0	192.380,0	1,0	1,0	1,0	192.380,0	192.380,0	192.380,0
01.ABG.005	Rekomendasi kebijakan Penyusunan Modul Kurikulum keahlian Robotic Telesurgery (LR)	1	Rekomendasi Kebijakan		356.800,0	1	1	1	390.505,0	390.505,0	390.505,0
01.ABG.005.701	Analisis Kebijakan Penyusunan Modul Kurikulum keahlian Robotic Telesurgery	1,0	Kegiatan	41.745,0	41.745,0	1,0	1,0	1,0	75.450,0	75.450,0	75.450,0

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	TAHUN 2023			PRAKIRAAN KEBUTUHAN (RIBU)						
		VOLUME / TARGET	SATUAN	SATUAN BIAYA	ALOKASI 2023 (RP RIBU)	VOLUME / TARGET			ALOKASI (RIBU)		
						2024	2025	2026	2024	2025	2026
01.ABG.005.702	Advokasi, Negosiasi, dan Pendampingan Kebijakan Penyusunan Modul Kurikulum keahlian Robotic Telesurgery	1,0	Kegiatan	315.055,0	315.055,0	1,0	1,0	1,0	315.055,0	315.055,0	315.055,0
01.ABG.006	Rekomendasi Kebijakan Sistem Akreditasi dan Sertifikasi Pelatihan Keahlian Robotic Telesurgery (LR)	1	Rekomendasi Kebijakan		355.750,0	1	1	1	355.750,0	355.750,0	355.750,0
01.ABG.006.701	Analisis Kebijakan Sistem Akreditasi dan Sertifikasi Pelatihan Keahlian Robotic Telesurgery	1,0	Kegiatan	41.745,0	41.745,0	1,0	1,0	1,0	41.745,0	41.745,0	41.745,0
01.ABG.006.702	Advokasi, Negosiasi, dan Pendampingan Kebijakan Sistem Akreditasi dan Sertifikasi Pelatihan Keahlian Robotic Telesurgery	1,0	Kegiatan	314.005,0	314.005,0	1,0	1,0	1,0	314.005,0	314.005,0	314.005,0
01.ABG.007	Rekomendasi kebijakan pembiayaan telediagnosis kedalam sistem JKN (PK)	1	Rekomendasi Kebijakan		348.270,0	1	1	1	348.270,0	348.270,0	348.270,0
01.ABG.007.701	Analisis Kebijakan pembiayaan telediagnosis kedalam sistem JKN	1,0	Kegiatan	39.510,0	39.510,0	1,0	1,0	1,0	39.510,0	39.510,0	39.510,0
01.ABG.007.702	Advokasi, Negosiasi, dan Pendampingan Kebijakan pembiayaan telediagnosis kedalam sistem JKN	1,0	Kegiatan	308.760,0	308.760,0	1,0	1,0	1,0	308.760,0	308.760,0	308.760,0
01.ABG.008	Rekomendasi Kebijakan Pengembangan CoE RS Vertikal Kemenkes melalui kerja sama Sister Hospital (LR)	1	Rekomendasi Kebijakan		333.995,0	1	1	1	333.995,0	333.995,0	333.995,0

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	TAHUN 2023			PRAKIRAAN KEBUTUHAN (RIBU)						
		VOLUME / TARGET	SATUAN	SATUAN BIAYA	ALOKASI 2023 (RP RIBU)	VOLUME / TARGET			ALOKASI (RIBU)		
						2024	2025	2026	2024	2025	2026
01.ABG.008.701	Analisis Kebijakan Pengembangan CoE RS Vertikal Kemenkes melalui kerja sama Sister Hospital	1,0	Kegiatan	41.235,0	41.235,0	1,0	1,0	1,0	41.235,0	41.235,0	41.235,0
01.ABG.008.702	Advokasi, Negosiasi, dan Pendampingan Kebijakan Pengembangan CoE RS Vertikal Kemenkes melalui kerja sama Sister Hospital	1,0	Kegiatan	292.760,0	292.760,0	1,0	1,0	1,0	292.760,0	292.760,0	292.760,0
01.ABG.009	Rekomendasi Kebijakan menghasilkan Health Talent di sektor kesehatan melalui kerja sama Sister Hospital (LR)	1	Rekomendasi Kebijakan		358.020,0	1	1	1	358.020,0	358.020,0	358.020,0
01.ABG.009.701	Analisis Kebijakan Health Talent di sektor kesehatan melalui kerja sama Sister Hospital	1,0	Kegiatan	44.010,0	44.010,0	1,0	1,0	1,0	44.010,0	44.010,0	44.010,0
01.ABG.009.702	Advokasi, Negosiasi, dan Pendampingan Kebijakan Health Talent di sektor kesehatan melalui kerja sama Sister Hospital	1,0	Kegiatan	314.010,0	314.010,0	1,0	1,0	1,0	314.010,0	314.010,0	314.010,0
01.ABG.010	Rekomendasi Penyusunan ATISA Sektor Jasa Kesehatan (HS)	1	Rekomendasi Kebijakan		353.770,0	1	1	1	353.770,0	353.770,0	353.770,0
01.ABG.010.701	Analisis Kebijakan Penyusunan ATISA Sektor Jasa Kesehatan	1,0	Kegiatan	45.010,0	45.010,0	1,0	1,0	1,0	45.010,0	45.010,0	45.010,0
01.ABG.010.702	Advokasi, Negosiasi, dan Pendampingan Kebijakan Penyusunan ATISA Sektor Jasa Kesehatan	1,0	Kegiatan	308.760,0	308.760,0	1,0	1,0	1,0	308.760,0	308.760,0	308.760,0

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	TAHUN 2023			PRAKIRAAN KEBUTUHAN (RIBU)						
		VOLUME / TARGET	SATUAN	SATUAN BIAYA	ALOKASI 2023 (RP RIBU)	VOLUME / TARGET			ALOKASI (RIBU)		
						2024	2025	2026	2024	2025	2026
01.ABG.011	Rekomendasi Kebijakan Penyusunan ASEAN POA Formulation and Production of Healthier Food and Beverages Options (TK)	1	Rekomendasi Kebijakan		349.770,0	1	1	1	349.770,0	349.770,0	349.770,0
01.ABG.011.701	Analisis Kebijakan Penyusunan ASEAN POA Formulation and Production of Healthier Food and Beverages Options	1,0	Kegiatan	41.010,0	41.010,0	1,0	1,0	1,0	41.010,0	41.010,0	41.010,0
01.ABG.011.702	Advokasi, Negosiasi, dan Pendampingan Kebijakan Penyusunan ASEAN POA Formulation and Production of Healthier Food and Beverages Options	1,0	Kegiatan	308.760,0	308.760,0	1,0	1,0	1,0	308.760,0	308.760,0	308.760,0
01.ABG.012	Rekomendasi Kebijakan perdagangan distribusi obat produksi luar negeri (RF)	1	Rekomendasi Kebijakan		352.770,0	1	1	1	352.770,0	352.770,0	352.770,0
01.ABG.012.701	Analisis Kebijakan perdagangan distribusi obat produksi luar negeri	1,0	Kegiatan	41.010,0	41.010,0	1,0	1,0	1,0	41.010,0	41.010,0	41.010,0
01.ABG.012.702	Advokasi, Negosiasi, dan Pendampingan Kebijakan perdagangan distribusi obat produksi luar negeri	1,0	Kegiatan	311.760,0	311.760,0	1,0	1,0	1,0	311.760,0	311.760,0	311.760,0
01.ABG.013	Rekomendasi Kebijakan Health Tourism (TK)	1	Rekomendasi Kebijakan		354.215,0	1	1	1	354.215,0	354.215,0	354.215,0
01.ABG.013.701	Analisis Kebijakan Health Tourism	1,0	Kegiatan	45.510,0	45.510,0	1,0	1,0	1,0	45.510,0	45.510,0	45.510,0
01.ABG.013.702	Advokasi, Negosiasi, dan Pendampingan Kebijakan Health Tourism	1,0	Kegiatan	308.705,0	308.705,0	1,0	1,0	1,0	308.705,0	308.705,0	308.705,0

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	TAHUN 2023			PRAKIRAAN KEBUTUHAN (RIBU)						
		VOLUME / TARGET	SATUAN	SATUAN BIAYA	ALOKASI 2023 (RP RIBU)	VOLUME / TARGET			ALOKASI (RIBU)		
						2024	2025	2026	2024	2025	2026
01.ABG.014	Rekomendasi Kebijakan Pengembangan Telemedicine dan Digital Health dengan mitra wicara (TK)	1	Rekomendasi Kebijakan		349.020,0	1	1	1	349.020,0	349.020,0	349.020,0
01.ABG.014.701	Analisis Kebijakan Pengembangan Telemedicine dan Digital Health dengan mitra wicara	1,0	Kegiatan	44.010,0	44.010,0	1,0	1,0	1,0	44.010,0	44.010,0	44.010,0
01.ABG.014.702	Advokasi, Negosiasi, dan Pendampingan Kebijakan Pengembangan Telemedicine dan Digital Health dengan mitra wicara	1,0	Kegiatan	305.010,0	305.010,0	1,0	1,0	1,0	305.010,0	305.010,0	305.010,0
01.ABG.015	Rekomendasi Kebijakan Pengelolaan Hibah dan Pinjaman Luar Negeri (TK)	1	Rekomendasi Kebijakan		368.850,0	1	1	1	368.850,0	368.850,0	368.850,0
01.ABG.015.701	Analisis Kebijakan Pengelolaan Hibah dan Pinjaman Luar Negeri	1,0	Kegiatan	189.550,0	189.550,0	1,0	1,0	1,0	189.550,0	189.550,0	189.550,0
01.ABG.015.702	Advokasi, Negosiasi, dan Pendampingan Kebijakan Pengelolaan Hibah dan Pinjaman Luar Negeri	1,0	Kegiatan	179.300,0	179.300,0	1,0	1,0	1,0	179.300,0	179.300,0	179.300,0
01.ABG.016	Rekomendasi Kebijakan Pemanfaatan Hibah dan Pinjaman Luar Negeri dalam Mendukung Transformasi Kesehatan (TK)	1	Rekomendasi Kebijakan		349.450,0	1	1	1	349.450,0	349.450,0	349.450,0
01.ABG.016.701	Analisis Kebijakan Pemanfaatan Hibah dan Pinjaman Luar Negeri dalam Mendukung Transformasi Kesehatan	1,0	Kegiatan	177.350,0	177.350,0	1,0	1,0	1,0	177.350,0	177.350,0	177.350,0

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	TAHUN 2023			PRAKIRAAN KEBUTUHAN (RIBU)						
		VOLUME / TARGET	SATUAN	SATUAN BIAYA	ALOKASI 2023 (RP RIBU)	VOLUME / TARGET			ALOKASI (RIBU)		
						2024	2025	2026	2024	2025	2026
01.ABG.016.702	Advokasi, Negosiasi, dan Pendampingan Kebijakan Pemanfaatan Hibah dan Pinjaman Luar Negeri dalam Mendukung Transformasi Kesehatan	1,0	Kegiatan	172.100,0	172.100,0	1,0	1,0	1,0	172.100,0	172.100,0	172.100,0
01.ABG.017	Rekomendasi Kebijakan Pemanfaatan Vaksin Merah Putih untuk Kesehatan Global (RF)	1	Rekomendasi Kebijakan		371.150,0	1	1	1	371.150,0	371.150,0	371.150,0
01.ABG.017.701	Analisis Kebijakan Pemanfaatan Vaksin Merah Putih untuk Kesehatan Global	1,0	Kegiatan	195.850,0	195.850,0	1,0	1,0	1,0	195.850,0	195.850,0	195.850,0
01.ABG.017.702	Advokasi, Negosiasi, dan Pendampingan Kebijakan Pemanfaatan Vaksin Merah Putih untuk Kesehatan Global	1,0	Kegiatan	175.300,0	175.300,0	1,0	1,0	1,0	175.300,0	175.300,0	175.300,0
01.ABG.018	Rekomendasi Kebijakan Pemanfaatan Telemedicine dan Digital Health untuk pelayanan Kesehatan (TK)	1	Rekomendasi Kebijakan		349.770,0	1	1	1	349.770,0	349.770,0	349.770,0
01.ABG.018.701	Analisis Kebijakan Pemanfaatan Telemedicine dan Digital Health untuk pelayanan Kesehatan	1,0	Kegiatan	41.010,0	41.010,0	1,0	1,0	1,0	41.010,0	41.010,0	41.010,0
01.ABG.018.702	Advokasi, Negosiasi, dan Pendampingan Kebijakan Pemanfaatan Telemedicine dan Digital Health untuk pelayanan Kesehatan	1,0	Kegiatan	308.760,0	308.760,0	1,0	1,0	1,0	308.760,0	308.760,0	308.760,0
01.AEA	Koordinasi		kegiatan		3.394.158,0				4.305.315,0	4.305.315,0	4.305.315,0
01.AEA.001	Integrasi dan Sinergi dalam rangka pencapaian pembangunan kesehatan (TK)	1	kegiatan		3.394.158,0	1	1	1	4.305.315,0	4.305.315,0	4.305.315,0

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	TAHUN 2023			PRAKIRAAN KEBUTUHAN (RIBU)						
		VOLUME / TARGET	SATUAN	SATUAN BIAYA	ALOKASI 2023 (RP RIBU)	VOLUME / TARGET			ALOKASI (RIBU)		
						2024	2025	2026	2024	2025	2026
01.AEA.001.702	Serial meeting Perencanaan dan Implementasi Kebijakan	1,0	Kegiatan	491.225,0	491.225,0	1,0	1,0	1,0	488.700,0	488.700,0	488.700,0
01.AEA.001.704	Analisis cepat kebijakan dalam rangka percepatan pembangunan kesehatan	1,0	Kegiatan	1.308.673,0	1.308.673,0	1,0	1,0	1,0	1.958.150,0	1.958.150,0	1.958.150,0
01.AEA.001.705	Evaluasi efektifitas dan implementasi kebijakan Kemenkes	1,0	Kegiatan	1.594.260,0	1.594.260,0	1,0	1,0	1,0	1.858.465,0	1.858.465,0	1.858.465,0
01.AEC	Kerja sama		Kesepakatan/ Dokumen/ Kegiatan		20.459.036,0				3.768.258,0	3.768.258,0	3.768.258,0
01.AEC.001	Pendampingan kerja sama bilateral untuk mendorong produsen luar negeri melakukan investasi produksi di Indonesia/joint venture (HS)	2	Kesepakatan		263.200,0	2	2	2	263.200,0	263.200,0	263.200,0
01.AEC.001.701	Persiapan Pendampingan kerja sama bilateral untuk mendorong produsen luar negeri melakukan investasi produksi di Indonesia/joint venture	1,0	Kegiatan	60.360,0	60.360,0	1,0	1,0	1,0	63.200,0	63.200,0	63.200,0
01.AEC.001.702	Pelaksanaan Pendampingan kerja sama bilateral untuk mendorong produsen luar negeri melakukan investasi produksi di Indonesia/joint venture	1,0	Kegiatan	202.840,0	202.840,0	1,0	1,0	1,0	200.000,0	200.000,0	200.000,0
01.AEC.002	Pengembangan skema kerjasama antara pemerintah dan mitra pembangunan luar dan dalam negeri (HS)	1	Kesepakatan		268.548,0	1	1	1	268.550,0	268.550,0	268.550,0

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	TAHUN 2023			PRAKIRAAN KEBUTUHAN (RIBU)						
		VOLUME / TARGET	SATUAN	SATUAN BIAYA	ALOKASI 2023 (RP RIBU)	VOLUME / TARGET			ALOKASI (RIBU)		
						2024	2025	2026	2024	2025	2026
01.AEC.002.701	Persiapan Pengembangan skema kerjasama antara pemerintah dan mitra pembangunan luar dan dalam negeri	1,0	Kegiatan	65.548,0	65.548,0	1,0	1,0	1,0	68.550,0	68.550,0	68.550,0
01.AEC.002.702	Pelaksanaan Pengembangan skema kerjasama antara pemerintah dan mitra pembangunan luar dan dalam negeri	1,0	Kegiatan	203.000,0	203.000,0	1,0	1,0	1,0	200.000,0	200.000,0	200.000,0
01.AEC.003	Dokumen Kerja Sama Luar Negeri Multilateral Bidang Kesehatan (HS)	3	Kesepakatan		15.842.004,0	3	3	3	566.004,0	566.004,0	566.004,0
01.AEC.003.701	Penyusunan Dokumen Kerja Sama Luar Negeri Multilateral Bidang Kesehatan	1,0	Kegiatan	15.645.624,0	15.645.624,0	1,0	1,0	1,0	100.000,0	100.000,0	100.000,0
01.AEC.003.702	Koordinasi Interkementerian	1,0	Kegiatan	103.260,0	103.260,0	1,0	1,0	1,0	400.000,0	400.000,0	400.000,0
01.AEC.003.703	Monitoring Evaluasi Dokumen Kerja Sama Luar Negeri Multilateral Bidang Kesehatan	1,0	Kegiatan	93.120,0	93.120,0	1,0	1,0	1,0	66.004,0	66.004,0	66.004,0
01.AEC.004	Dokumen Kerja Sama Luar Negeri Regional dan Bilateral Bidang Kesehatan (HS)	2	Kesepakatan		1.184.764,0	2	2	2	1.184.764,0	1.184.764,0	1.184.764,0
01.AEC.004.701	Penyusunan Dokumen Kerja Sama Luar Negeri Regional dan Bilateral Bidang Kesehatan	1,0	Kegiatan	659.890,0	659.890,0	1,0	1,0	1,0	659.890,0	659.890,0	659.890,0
01.AEC.004.702	Koordinasi Interkementerian	1,0	Kegiatan	169.834,0	169.834,0	1,0	1,0	1,0	169.834,0	169.834,0	169.834,0
01.AEC.004.703	Monitoring Evaluasi Dokumen Kerja Sama Luar Negeri Regional dan Bilateral Bidang Kesehatan	1,0	Kegiatan	355.040,0	355.040,0	1,0	1,0	1,0	355.040,0	355.040,0	355.040,0
01.AEC.005	Dokumen Kerja Sama Pinjaman Hibah Luar Negeri (HS)	2	Kesepakatan		898.600,0	2	2	2	576.500,0	576.500,0	576.500,0

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	TAHUN 2023			PRAKIRAAN KEBUTUHAN (RIBU)						
		VOLUME / TARGET	SATUAN	SATUAN BIAYA	ALOKASI 2023 (RP RIBU)	VOLUME / TARGET			ALOKASI (RIBU)		
						2024	2025	2026	2024	2025	2026
01.AEC.005.701	Penyusunan Dokumen Kerja Sama Pinjaman Hibah Luar Negeri	1,0	Kegiatan	663.600,0	663.600,0	1,0	1,0	1,0	341.500,0	341.500,0	341.500,0
01.AEC.005.702	Koordinasi Interkementerian	1,0	Kegiatan	112.760,0	112.760,0	1,0	1,0	1,0	112.760,0	112.760,0	112.760,0
01.AEC.005.703	Monitoring Evaluasi Dokumen Kerja Sama Pinjaman Hibah Luar Negeri	1,0	Kegiatan	122.240,0	122.240,0	1,0	1,0	1,0	122.240,0	122.240,0	122.240,0
01.AEC.006	Dokumen Kerja Sama Bioteknologi dan Informatika Kesehatan (TK)	2	Kesepakatan		2.001.920,0	2	2	2	909.240,0	909.240,0	909.240,0
01.AEC.006.701	Penyusunan Dokumen Kerja Sama Bioteknologi dan Informatika Kesehatan	1,0	Kegiatan	1.709.880,0	1.709.880,0	1,0	1,0	1,0	617.200,0	617.200,0	617.200,0
01.AEC.006.702	Koordinasi Interkementerian	1,0	Kegiatan	142.520,0	142.520,0	1,0	1,0	1,0	142.520,0	142.520,0	142.520,0
01.AEC.006.703	Monitoring Evaluasi Dokumen Kerja Sama Bioteknologi dan Informatika Kesehatan	1,0	Kegiatan	149.520,0	149.520,0	1,0	1,0	1,0	149.520,0	149.520,0	149.520,0
01.AEG	Konferensi dan Event		Kegiatan/ Paket Kegiatan		8.930.841,0				8.852.703,0	8.852.703,0	8.852.703,0
01.AEG.001	Tuan Rumah Penyelenggaraan Pertemuan Internasional (HS)	2	Kegiatan		4.461.643,0	2	2	2	4.380.625,0	4.380.625,0	4.380.625,0
01.AEG.001.701	Persiapan Pertemuan Internasional	1,0	Kegiatan	6.000,0	6.000,0	1,0	1,0	1,0	6.000,0	6.000,0	6.000,0
01.AEG.001.702	Pelaksanaan Pertemuan Internasional	1,0	Kegiatan	4.455.643,0	4.455.643,0	1,0	1,0	1,0	4.374.625,0	4.374.625,0	4.374.625,0
01.AEG.002	Pertemuan Joint Working Group (HS)	1	Kegiatan		498.298,0	1	1	1	498.298,0	498.298,0	498.298,0
01.AEG.002.701	Persiapan Pertemuan Joint Working Group	1,0	Kegiatan	6.750,0	6.750,0	1,0	1,0	1,0	6.750,0	6.750,0	6.750,0

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	TAHUN 2023			PRAKIRAAN KEBUTUHAN (RIBU)						
		VOLUME / TARGET	SATUAN	SATUAN BIAYA	ALOKASI 2023 (RP RIBU)	VOLUME / TARGET			ALOKASI (RIBU)		
						2024	2025	2026	2024	2025	2026
01.AEG.002.702	Pelaksanaan Pertemuan Joint Working Group	1,0	Kegiatan	491.548,0	491.548,0	1,0	1,0	1,0	491.548,0	491.548,0	491.548,0
01.AEG.003	Partisipasi aktif dalam Sidang Internasional Bilateral, Regional dan Multilateral Bidang Kesehatan (HS)	3	Kegiatan		3.372.760,0	3	3	3	3.372.760,0	3.372.760,0	3.372.760,0
01.AEG.003.701	Pelaksanaan Sidang/Pertemuan Internasional	3,0	Kegiatan	1.124.253,3	3.372.760,0	3,0	3,0	3,0	3.372.760,0	3.372.760,0	3.372.760,0
01.AEG.005	Eksplorasi potensi kerja sama untuk pengembangan BBO baru yang mempunyai pemakaian terbesar JKN (RF)	1	Kegiatan		390.910,0	1	1	1	393.790,0	393.790,0	393.790,0
01.AEG.005.701	Persiapan Eksplorasi potensi kerja sama untuk pengembangan BBO baru yang mempunyai pemakaian terbesar JKN	1,0	Kegiatan	6.750,0	6.750,0	1,0	1,0	1,0	6.750,0	6.750,0	6.750,0
01.AEG.005.702	Pelaksanaan Eksplorasi potensi kerja sama untuk pengembangan BBO baru yang mempunyai pemakaian terbesar JKN	1,0	Kegiatan	384.160,0	384.160,0	1,0	1,0	1,0	387.040,0	387.040,0	387.040,0
01.AEG.006	Pengembangan dan percepatan produksi obat bioteknologi dan fraksinasi plasma melalui sinergitas ABGC (RF)	1	Kegiatan		207.230,0	1	1	1	207.230,0	207.230,0	207.230,0
01.AEG.006.701	Persiapan Pengembangan dan percepatan produksi obat bioteknologi dan fraksinasi plasma melalui sinergitas ABGC pengembangan BBO baru yang mempunyai pemakaian terbesar JKN	1,0	Kegiatan	18.990,0	18.990,0	1,0	1,0	1,0	18.990,0	18.990,0	18.990,0

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	TAHUN 2023			PRAKIRAAN KEBUTUHAN (RIBU)						
		VOLUME / TARGET	SATUAN	SATUAN BIAYA	ALOKASI 2023 (RP RIBU)	VOLUME / TARGET			ALOKASI (RIBU)		
						2024	2025	2026	2024	2025	2026
01.AEG.006.702	Pelaksanaan Pengembangan dan percepatan produksi obat bioteknologi dan fraksinasi plasma melalui sinergitas ABGC	1,0	Kegiatan	188.240,0	188.240,0	1,0	1,0	1,0	188.240,0	188.240,0	188.240,0
01.AEH	Promosi		promosi/ Kegiatan		582.187,0				765.096,0	765.096,0	765.096,0
01.AEH.001	Pelaksanaan Promosi dalam rangka mendorong investasi produksi alkes dalam negeri (RF)	1	promosi		582.187,0	1	1	1	765.096,0	765.096,0	765.096,0
01.AEH.001.701	Persiapan Promosi dalam rangka mendorong investasi produksi alkes dalam negeri	1,0	Kegiatan	4.500,0	4.500,0	1,0	1,0	1,0	4.500,0	4.500,0	4.500,0
01.AEH.001.702	Pelaksanaan Promosi dalam rangka mendorong investasi produksi alkes dalam negeri	1,0	Kegiatan	577.687,0	577.687,0	1,0	1,0	1,0	760.596,0	760.596,0	760.596,0
Total					39.836.202,0	-	-	-	24.195.057,0	24.195.057,0	24.195.057,0

C. SUMBER PENDANAAN

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	JENIS KOMPONEN	INDIKASI PENDANAAN TAHUN 2023										
			RP	PNBP	BLU	PLN	RMP	PDN	HIBAH	PH	SBSN	HN	TOTAL
01	Meningkatnya kebijakan Kesehatan Global dan Teknologi Kesehatan berbasis bukti		39.836.202,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	39.836.202,0
01.ABG	Kebijakan Bidang Kesehatan		6.469.980,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6.469.980,0
01.ABG.001	Rekomendasi kebijakan posisi Indonesia sebagai Troika G20 2023 (HS)		371.150,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	371.150,0
01.ABG.001.701	Analisis Kebijakan posisi Indonesia sebagai Troika G20 2023	Utama	195.850,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	195.850,0

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	JENIS KOMPONEN	INDIKASI PENDANAAN TAHUN 2023											
			RP	PNBP	BLU	PLN	RMP	PDN	HIBAH	PH	SBSN	HN	TOTAL	
01.ABG.001.702	Advokasi, Negosiasi, dan Pendampingan Kebijakan posisi Indonesia sebagai Troika G20 2023	Utama	175.300,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	175.300,0
01.ABG.002	Rekomendasi kebijakan strategi untuk mendorong output keketuaan G20 bidang Kesehatan menjadi bagian dari Amandemen IHR 2005 dan instrumen baru untuk kesiapsiagaan dan respon pandemik (HS)		371.150,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	371.150,0
01.ABG.002.701	Analisis Kebijakan strategi untuk mendorong output keketuaan G20 bidang Kesehatan menjadi bagian dari Amandemen IHR 2005 dan instrumen baru untuk kesiapsiagaan dan respon pandemik	Utama	195.850,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	195.850,0
01.ABG.002.702	Advokasi, Negosiasi, dan Pendampingan Kebijakan strategi untuk mendorong output keketuaan G20 bidang Kesehatan menjadi bagian dari Amandemen IHR 2005 dan instrumen baru untuk kesiapsiagaan dan respon pandemik	Utama	175.300,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	175.300,0
01.ABG.003	Rekomendasi kebijakan untuk implementasi resolusi, WHO Regional Committee, World Health Assembly dan UN General Assembly di Indonesia (HS)		387.540,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	387.540,0
01.ABG.003.701	Analisis Kebijakan implementasi resolusi, WHO Regional Committee, World Health Assembly dan UN General Assembly di Indonesia	Utama	198.380,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	198.380,0
01.ABG.003.702	Advokasi, Negosiasi, dan Pendampingan Kebijakan implementasi resolusi, WHO Regional Committee, World Health Assembly dan UN General Assembly di Indonesia	Utama	189.160,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	189.160,0
01.ABG.004	Rekomendasi Kebijakan posisi Indonesia terhadap kebijakan/inisiatif kesehatan global (HS)		388.540,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	388.540,0

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	JENIS KOMPONEN	INDIKASI PENDANAAN TAHUN 2023											
			RP	PNBP	BLU	PLN	RMP	PDN	HIBAH	PH	SBSN	HN	TOTAL	
01.ABG.004.701	Analisis Kebijakan posisi Indonesia terhadap kebijakan/inisiatif kesehatan global	Utama	196.160,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	196.160,0
01.ABG.004.702	Advokasi, Negosiasi, dan Pendampingan Kebijakan posisi Indonesia terhadap kebijakan/inisiatif kesehatan global	Utama	192.380,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	192.380,0
01.ABG.005	Rekomendasi kebijakan Penyusunan Modul Kurikulum keahlian Robotic Telesurgery (LR)		356.800,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	356.800,0
01.ABG.005.701	Analisis Kebijakan Penyusunan Modul Kurikulum keahlian Robotic Telesurgery	Utama	41.745,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	41.745,0
01.ABG.005.702	Advokasi, Negosiasi, dan Pendampingan Kebijakan Penyusunan Modul Kurikulum keahlian Robotic Telesurgery	Utama	315.055,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	315.055,0
01.ABG.006	Rekomendasi Kebijakan Sistem Akreditasi dan Sertifikasi Pelatihan Keahlian Robotic Telesurgery (LR)		355.750,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	355.750,0
01.ABG.006.701	Analisis Kebijakan Sistem Akreditasi dan Sertifikasi Pelatihan Keahlian Robotic Telesurgery	Utama	41.745,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	41.745,0
01.ABG.006.702	Advokasi, Negosiasi, dan Pendampingan Kebijakan Sistem Akreditasi dan Sertifikasi Pelatihan Keahlian Robotic Telesurgery	Utama	314.005,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	314.005,0
01.ABG.007	Rekomendasi kebijakan pembiayaan telediagnosis kedalam sistem JKN (PK)		348.270,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	348.270,0
01.ABG.007.701	Analisis Kebijakan pembiayaan telediagnosis kedalam sistem JKN	Utama	39.510,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	39.510,0
01.ABG.007.702	Advokasi, Negosiasi, dan Pendampingan Kebijakan pembiayaan telediagnosis kedalam sistem JKN	Utama	308.760,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	308.760,0
01.ABG.008	Rekomendasi Kebijakan Pengembangan CoE RS Vertikal Kemenkes melalui kerja sama Sister Hospital (LR)		333.995,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	333.995,0

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	JENIS KOMPONEN	INDIKASI PENDANAAN TAHUN 2023											
			RP	PNBP	BLU	PLN	RMP	PDN	HIBAH	PH	SBSN	HN	TOTAL	
01.ABG.008.701	Analisis Kebijakan Pengembangan CoE RS Vertikal Kemenkes melalui kerja sama Sister Hospital	Utama	41.235,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	41.235,0
01.ABG.008.702	Advokasi, Negosiasi, dan Pendampingan Kebijakan Pengembangan CoE RS Vertikal Kemenkes melalui kerja sama Sister Hospital	Utama	292.760,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	292.760,0
01.ABG.009	Rekomendasi Kebijakan menghasilkan Health Talent di sektor kesehatan melalui kerja sama Sister Hospital (LR)		358.020,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	358.020,0
01.ABG.009.701	Analisis Kebijakan Health Talent di sektor kesehatan melalui kerja sama Sister Hospital	Utama	44.010,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	44.010,0
01.ABG.009.702	Advokasi, Negosiasi, dan Pendampingan Kebijakan Health Talent di sektor kesehatan melalui kerja sama Sister Hospital	Utama	314.010,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	314.010,0
01.ABG.010	Rekomendasi Penyusunan ATISA Sektor Jasa Kesehatan (HS)		353.770,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	353.770,0
01.ABG.010.701	Analisis Kebijakan Penyusunan ATISA Sektor Jasa Kesehatan	Utama	45.010,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	45.010,0
01.ABG.010.702	Advokasi, Negosiasi, dan Pendampingan Kebijakan Penyusunan ATISA Sektor Jasa Kesehatan	Utama	308.760,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	308.760,0
01.ABG.011	Rekomendasi Kebijakan Penyusunan ASEAN POA Formulation and Production of Healthier Food and Beverages Options (TK)		349.770,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	349.770,0
01.ABG.011.701	Analisis Kebijakan Penyusunan ASEAN POA Formulation and Production of Healthier Food and Beverages Options	Utama	41.010,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	41.010,0
01.ABG.011.702	Advokasi, Negosiasi, dan Pendampingan Kebijakan Penyusunan ASEAN POA Formulation and Production of Healthier Food and Beverages Options	Utama	308.760,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	308.760,0

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	JENIS KOMPONEN	INDIKASI PENDANAAN TAHUN 2023											
			RP	PNBP	BLU	PLN	RMP	PDN	HIBAH	PH	SBSN	HN	TOTAL	
01.ABG.012	Rekomendasi Kebijakan perdagangan distribusi obat produksi luar negeri (RF)		352.770,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	352.770,0
01.ABG.012.701	Analisis Kebijakan perdagangan distribusi obat produksi luar negeri	Utama	41.010,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	41.010,0
01.ABG.012.702	Advokasi, Negosiasi, dan Pendampingan Kebijakan perdagangan distribusi obat produksi luar negeri	Utama	311.760,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	311.760,0
01.ABG.013	Rekomendasi Kebijakan Health Tourism (TK)		354.215,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	354.215,0
01.ABG.013.701	Analisis Kebijakan Health Tourism	Utama	45.510,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	45.510,0
01.ABG.013.702	Advokasi, Negosiasi, dan Pendampingan Kebijakan Health Tourism	Utama	308.705,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	308.705,0
01.ABG.014	Rekomendasi Kebijakan Pengembangan Telemedicine dan Digital Health dengan mitra wicara (TK)		349.020,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	349.020,0
01.ABG.014.701	Analisis Kebijakan Pengembangan Telemedicine dan Digital Health dengan mitra wicara	Utama	44.010,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	44.010,0
01.ABG.014.702	Advokasi, Negosiasi, dan Pendampingan Kebijakan Pengembangan Telemedicine dan Digital Health dengan mitra wicara	Utama	305.010,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	305.010,0
01.ABG.015	Rekomendasi Kebijakan Pengelolaan Hibah dan Pinjaman Luar Negeri (TK)		368.850,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	368.850,0
01.ABG.015.701	Analisis Kebijakan Pengelolaan Hibah dan Pinjaman Luar Negeri	Utama	189.550,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	189.550,0
01.ABG.015.702	Advokasi, Negosiasi, dan Pendampingan Kebijakan Pengelolaan Hibah dan Pinjaman Luar Negeri	Utama	179.300,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	179.300,0
01.ABG.016	Rekomendasi Kebijakan Pemanfaatan Hibah dan Pinjaman Luar Negeri dalam Mendukung Transformasi Kesehatan (TK)		349.450,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	349.450,0

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	JENIS KOMPONEN	INDIKASI PENDANAAN TAHUN 2023											
			RP	PNBP	BLU	PLN	RMP	PDN	HIBAH	PH	SBSN	HN	TOTAL	
01.ABG.016.701	Analisis Kebijakan Pemanfaatan Hibah dan Pinjaman Luar Negeri dalam Mendukung Transformasi Kesehatan	Utama	177.350,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	177.350,0
01.ABG.016.702	Advokasi, Negosiasi, dan Pendampingan Kebijakan Pemanfaatan Hibah dan Pinjaman Luar Negeri dalam Mendukung Transformasi Kesehatan	Utama	172.100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	172.100,0
01.ABG.017	Rekomendasi Kebijakan Pemanfaatan Vaksin Merah Putih untuk Kesehatan Global (RF)		371.150,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	371.150,0
01.ABG.017.701	Analisis Kebijakan Pemanfaatan Vaksin Merah Putih untuk Kesehatan Global	Utama	195.850,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	195.850,0
01.ABG.017.702	Advokasi, Negosiasi, dan Pendampingan Kebijakan Pemanfaatan Vaksin Merah Putih untuk Kesehatan Global	Utama	175.300,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	175.300,0
01.ABG.018	Rekomendasi Kebijakan Pemanfaatan Telemedicine dan Digital Health untuk pelayanan Kesehatan (TK)		349.770,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	349.770,0
01.ABG.018.701	Analisis Kebijakan Pemanfaatan Telemedicine dan Digital Health untuk pelayanan Kesehatan	Utama	41.010,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	41.010,0
01.ABG.018.702	Advokasi, Negosiasi, dan Pendampingan Kebijakan Pemanfaatan Telemedicine dan Digital Health untuk pelayanan Kesehatan	Utama	308.760,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	308.760,0
01.AEA	Koordinasi		3.394.158,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3.394.158,0
01.AEA.001	Integrasi dan Sinergi dalam rangka pencapaian pembangunan kesehatan (TK)		3.394.158,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3.394.158,0
01.AEA.001.702	Serial meeting Perencanaan dan Implementasi Kebijakan	Utama	491.225,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	491.225,0
01.AEA.001.704	Analisis cepat kebijakan dalam rangka percepatan pembangunan kesehatan	Utama	1.308.673,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.308.673,0
01.AEA.001.705	Evaluasi efektifitas dan implementasi kebijakan Kemenkes	Utama	1.594.260,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.594.260,0

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	JENIS KOMPONEN	INDIKASI PENDANAAN TAHUN 2023											
			RP	PNBP	BLU	PLN	RMP	PDN	HIBAH	PH	SBSN	HN	TOTAL	
01.AEC	Kerja sama		20.459.036,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20.459.036,0
01.AEC.001	Pendampingan kerja sama bilateral untuk mendorong produsen luar negeri melakukan investasi produksi di Indonesia/joint venture (HS)		263.200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	263.200,0
01.AEC.001.701	Persiapan Pendampingan kerja sama bilateral untuk mendorong produsen luar negeri melakukan investasi produksi di Indonesia/joint venture	Utama	60.360,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	60.360,0
01.AEC.001.702	Pelaksanaan Pendampingan kerja sama bilateral untuk mendorong produsen luar negeri melakukan investasi produksi di Indonesia/joint venture	Utama	202.840,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	202.840,0
01.AEC.002	Pengembangan skema kerjasama antara pemerintah dan mitra pembangunan luar dan dalam negeri (HS)		268.548,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	268.548,0
01.AEC.002.701	Persiapan Pengembangan skema kerjasama antara pemerintah dan mitra pembangunan luar dan dalam negeri	Utama	65.548,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	65.548,0
01.AEC.002.702	Pelaksanaan Pengembangan skema kerjasama antara pemerintah dan mitra pembangunan luar dan dalam negeri	Utama	203.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	203.000,0
01.AEC.003	Dokumen Kerja Sama Luar Negeri Multilateral Bidang Kesehatan (HS)		15.842.004,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	15.842.004,0
01.AEC.003.701	Penyusunan Dokumen Kerja Sama Luar Negeri Multilateral Bidang Kesehatan	Utama	15.645.624,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	15.645.624,0
01.AEC.003.702	Koordinasi Interkementerian	Utama	103.260,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	103.260,0
01.AEC.003.703	Monitoring Evaluasi Dokumen Kerja Sama Luar Negeri Multilateral Bidang Kesehatan	Utama	93.120,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	93.120,0
01.AEC.004	Dokumen Kerja Sama Luar Negeri Regional dan Bilateral Bidang Kesehatan (HS)		1.184.764,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.184.764,0

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	JENIS KOMPONEN	INDIKASI PENDANAAN TAHUN 2023										
			RP	PNBP	BLU	PLN	RMP	PDN	HIBAH	PH	SBSN	HN	TOTAL
01.AEC.004.701	Penyusunan Dokumen Kerja Sama Luar Negeri Regional dan Bilateral Bidang Kesehatan	Utama	659.890,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	659.890,0
01.AEC.004.702	Koordinasi Interkementerian	Utama	169.834,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	169.834,0
01.AEC.004.703	Monitoring Evaluasi Dokumen Kerja Sama Luar Negeri Regional dan Bilateral Bidang Kesehatan	Utama	355.040,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	355.040,0
01.AEC.005	Dokumen Kerja Sama Pinjaman Hibah Luar Negeri (HS)		898.600,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	898.600,0
01.AEC.005.701	Penyusunan Dokumen Kerja Sama Pinjaman Hibah Luar Negeri	Utama	663.600,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	663.600,0
01.AEC.005.702	Koordinasi Interkementerian	Utama	112.760,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	112.760,0
01.AEC.005.703	Monitoring Evaluasi Dokumen Kerja Sama Pinjaman Hibah Luar Negeri	Utama	122.240,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	122.240,0
01.AEC.006	Dokumen Kerja Sama Bioteknologi dan Informatika Kesehatan (TK)		2.001.920,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2.001.920,0
01.AEC.006.701	Penyusunan Dokumen Kerja Sama Bioteknologi dan Informatika Kesehatan	Utama	1.709.880,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.709.880,0
01.AEC.006.702	Koordinasi Interkementerian	Utama	142.520,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	142.520,0
01.AEC.006.703	Monitoring Evaluasi Dokumen Kerja Sama Bioteknologi dan Informatika Kesehatan	Utama	149.520,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	149.520,0
01.AEG	Konferensi dan Event		8.930.841,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8.930.841,0
01.AEG.001	Tuan Rumah Penyelenggaraan Pertemuan Internasional (HS)		4.461.643,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4.461.643,0
01.AEG.001.701	Persiapan Pertemuan Internasional	Utama	6.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6.000,0
01.AEG.001.702	Pelaksanaan Pertemuan Internasional	Utama	4.455.643,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4.455.643,0
01.AEG.002	Pertemuan Joint Working Group (HS)		498.298,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	498.298,0
01.AEG.002.701	Persiapan Pertemuan Joint Working Group	Utama	6.750,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6.750,0
01.AEG.002.702	Pelaksanaan Pertemuan Joint Working Group	Utama	491.548,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	491.548,0

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	JENIS KOMPONEN	INDIKASI PENDANAAN TAHUN 2023											
			RP	PNBP	BLU	PLN	RMP	PDN	HIBAH	PH	SBSN	HN	TOTAL	
01.AEG.003	Partisipasi aktif dalam Sidang Internasional Bilateral, Regional dan Multilateral Bidang Kesehatan (HS)		3.372.760,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3.372.760,0
01.AEG.003.701	Pelaksanaan Sidang/Pertemuan Internasional	Utama	3.372.760,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3.372.760,0
01.AEG.005	Eksplorasi potensi kerja sama untuk pengembangan BBO baru yang mempunyai pemakaian terbesar JKN (RF)		390.910,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	390.910,0
01.AEG.005.701	Persiapan Eksplorasi potensi kerja sama untuk pengembangan BBO baru yang mempunyai pemakaian terbesar JKN	Utama	6.750,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6.750,0
01.AEG.005.702	Pelaksanaan Eksplorasi potensi kerja sama untuk pengembangan BBO baru yang mempunyai pemakaian terbesar JKN	Utama	384.160,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	384.160,0
01.AEG.006	Pengembangan dan percepatan produksi obat bioteknologi dan fraksionasi plasma melalui sinergitas ABGC (RF)		207.230,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	207.230,0
01.AEG.006.701	Persiapan Pengembangan dan percepatan produksi obat bioteknologi dan fraksionasi plasma melalui sinergitas ABGC pengembangan BBO baru yang mempunyai pemakaian terbesar JKN	Utama	18.990,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	18.990,0
01.AEG.006.702	Pelaksanaan Pengembangan dan percepatan produksi obat bioteknologi dan fraksionasi plasma melalui sinergitas ABGC	Utama	188.240,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	188.240,0
01.AEH	Promosi		582.187,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	582.187,0
01.AEH.001	Pelaksanaan Promosi dalam rangka mendorong investasi produksi alkes dalam negeri (RF)		582.187,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	582.187,0
01.AEH.001.701	Persiapan Promosi dalam rangka mendorong investasi produksi alkes dalam negeri	Utama	4.500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4.500,0
01.AEH.001.702	Pelaksanaan Promosi dalam rangka mendorong investasi produksi alkes dalam negeri	Utama	577.687,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	577.687,0

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	JENIS KOMPONEN	INDIKASI PENDANAAN TAHUN 2023											
			RP	PNBP	BLU	PLN	RMP	PDN	HIBAH	PH	SBSN	HN	TOTAL	
Total			39.836.202,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	39.836.202,0

12 Desember 2022
 Kepala Pusat Kebijakan Kesehatan Global dan Teknologi Kesehatan



BONANZA PERWIRA TAIHITU
 NID. 197307281999031001